GERAKAN SOSIAL EKS-HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI SIDOARJO

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

VINDY
NIM. E91217056

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Vindy

NIM : E91217056

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Januari 2022
Saya yang menyatakan,

Vindy
NIM. E91217056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Gerakan Sosial eks-Hizbut Tahrir Indonesia di Sidoarjo” yang ditulis oleh Vindy (E91217056) ini telah disetujui pada tanggal 6 Januari 2022

Surabaya, 6 Januari 2022

Pembimbing,

Dr. H. Ainur Rofiq Al-Amin, M.Ag
NIP. 197206252005011007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Gerakan Sosial eks-Hizbut Tahrir Indonesia di Sidoarjo" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi, pada hari Kamis, 13 Januari 2022.

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Dekan

Dr. Kunjwi, M. Ag

NIP. 196409181992031002

Penguji I,

Dr. H. Ainur Rofiq Al-Amin, M.Ag

NIP. 197206252005011007

Penguji II,

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001

Penguji III,

Dr. H. M. Syamsul Huda, M.Fil.I

NIP. 197203291997031006

Penguji IV

Fikri Mahzumi, S.Hum.,M.Fil.I

NIP. 198204152015031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vindy
NIM : E91217056
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Akidah dan Filsafat Islam
E-mail address : 1998.vindy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

"GERAKAN SOSIAL EKS-HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI SIDOARJO".

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Februari 2022

Penulis

Vindy

ABSTRAK

Penelitian ini secara kualitatif menjelaskan cara menyusup dan arah upaya gerakan sosial eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo perspektif McAdam dalam menggambarkan kondisi politik seperti apakah yang mendorong eks-HTI menyusup ke Masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Adapun terkait cara menyusup mereka melalui pemanfaatan dan pengelolaan masjid yang belum memiliki struktur komunitas dakwah masjid yang aktif. Terkait arah upaya gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo melalui politisasi Islamlah guna mengurangi dampak negatif tekanan negara terhadap eksistensi mereka. Sehingga, mereka memanfaatkan terbukanya struktur kesempatan dakwah di komunitas Remaja Masjid Al-Firdaus Sidoarjo dengan cara membentuk sejumlah gerakan baru dengan diam-diam menyebarkan konten kajian online dan buletin dakwah kepada beberapa jemaah pilihan mereka melalui pemanfaatan pembentukan anak cabang komunitas dakwah baru mereka. Sehingga, melalui gerakan baru anak cabang komunitas dakwah baru mereka tersebut mempermudah pencarian berbagai cara dalam pembaharuan gerakan untuk memperkuat cita-cita dan ideologi lama mereka, salah satunya dengan mengusahakan pertambahan anggota baru dalam mendukung Khilafah Islamiyah versi mereka.

Kata kunci: Gerakan Sosial, eks-HTI, Masjid Al-Firdaus Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....**Error! Bookmark not defined.**
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
ABSTRAK ivi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI.....viiviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan..... 5
D. Manfaat Penelitian..... 6
E. Kajian Terdahulu 6
F. Kerangka Teori..... 9
G. Metodologi Penelitian 10
H. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN TEORI..... 13
A. Konsep dan Teori Gerakan Sosial McAdam..... 13
1. Gerakan sosial sebagai fenomena politik 13
2. Kondisi pendorong keberhasilan gerakan sosial 14
3. Sumber koneksi politik gerakan sosial 26
BAB III GERAKAN SOSIAL EKS-HTI DI SIDOARJO..... 31
A. Mengenal HTI Sidoarjo..... 31
B. Gerakakan Sosial eks-HTI di Sidoarjo..... 33
1. Taktik menyusup eks-HTI Sidoarjo 39
2. Tema kajian eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo..... 43
C. Dampak Gerakan Sosial eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo..... 51
BAB IV TINJAUAN ANALISIS 55
A. Arah Gerakan Sosial eks-HTI Sidoarjo Perspektif Doug McAdam..... 55
1. Gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo sebagai fenomena politik..... 55
2. Faktor pendukung gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber koneksi politik gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo 65
BAB V PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**
A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan Sosial HTI di Sidoarjo pada awal kedatangannya merujuk pada cita-cita Taqiyyuddin An-Nabhani sebagai pendiri Hizbut Tahrir pada tahun 1953, dengan pertama kali berdiri di kota Baitul Maqdis, Palestina. Secara umum HT ingin menegakkan Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir menitikberatkan dengan membangun sistem politik dalam label khilafah melalui pembaiatan seseorang khalifah adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Ainur Rofiq Al-Amin sebagai mantan pengurus bidang *Lajna Siyasi* HTI menuturkan bahwa, dalam buku "Al-Fikr al-Islami" yang sebelumnya ia pakai untuk pelengkap materi *halaqah*. Menegaskan, bahwa suatu kesalahan jika terdapat pemahaman tentang wajib *kifayah* berarti jika sudah terdapat sebagian kaum muslim yang menjalankan hal-hal yang diperintahkan, meskipun belum membuahkan hasil maka gugurlah kewajiban sebagian muslim lain. Oleh sebab itu, pengartian wajib *kifayah* yang tepat menurut Muhammad Ismail dalam bukunya *Al-Fikr al-Islami* menegaskan, jika sebagian orang dengan benar-benar telah menyelesaikan hal-hal yang diperintahkan tersebut, maka gugurlah kewajiban atas muslimin yang lain. [1]

Dalam hubungan konteks antara khilafah dan wajib *kifayah* adalah, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa meskipun menegakkan khilafah Islam

[1] Ainur Rofiq Al-Amin, *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir* (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan wajib *kifayah*, tetapi selama khilafah belum berdiri, maka setiap perorangan muslim yang *mukallaf* berkewajiban dalam menegakkannya tanpa pandang status sampai khilafah benar-benar berdiri tegak. Sehingga, selama khilafah belum berdiri maka semua muslimin terkena kewajiban tersebut.[2] Sementara, agar lebih mengukuhkan bahwa menegakkan khilafah dan melantik khalifah adalah wajib, maka pengikut Hizbut Tahrir juga menambahi dengan pernyataan bahwa khilafah merupakan mahkota dari semua kewajiban yang dibebankan Allah kepada umat muslim.[3]

Kemudian, gerakan ini datang ke Indonesia sekitar pada tahun 1980, dengan tokoh pemuka salah satunya Abdurrahman Al-Baghdadi. Sedangkan, anggapan Ismail Yusanto, Hizbut Tahrir juga masuk ke Indonesia pada tahun 2000. Gerakan ini mulanya eksis pada muka publik melalui *Kongres Internasional Khilafah Islamiyah* yang digelar di Jakarta dengan melabeli diri dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).[4]

Gerakan ini menjelma menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pasca reformasi, mereka mendaftarkan diri menjadi organisasi masyarakat di Indonesia. Karena runtuhnya rezim Orde Baru tersebut membawa angin segar bagi HTI dalam melenggangkan sayap kekuasaan mereka dalam menyebarluaskan ide ajaran Khilafah Islamiyah mereka. Pada saat itu juga, demokratisasi di Indonesia

---

[2] Ibid, 2-3.
[3] Muhammad Shuwayki, "Taj Al-Furud al-Khilafah", *al-Wa'i* No.130 (1998), 8. Dalam buku *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir* , 3.
[4] Muhammad Ismail Yusanto, "Kebangkitan Islam Menantang Modernisasi dan Globalisasi", *Al-Wa'i* no. 67 tahun VI (Edisi Khusus Maret 2006), 57. Dalam buku *Mematahkan Argumen Hizbut* Tahrir, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi wadah geliat gerak mereka dalam kebebasan menyuarakan kepentingan mereka dalam sistem kepartaian ataupun non kepartaian.

Gerakan eks-HTI dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah daerah di Indonesia khususnya pada kota-kota yang mereka kaji tingkat IPM-nya (Indeks Pembangunan Manusia). Dimana IPM tersebut sebagai tolak ukur kemampuan penduduknya dalam bagaimana mengakses fasilitas di wilayahnya dalam memperoleh kebutuhan mereka, dimisalkan terkait tingkat minat terhadap pendidikan. Jika nilai IPM semakin tinggi, maka memungkinkan bagi tingginya pembangunan terhadap pola pikir yang bersifat baru. Sidoarjo pada 2019 tercatat memiliki IPM sangat tinggi oleh UNDP dalam laporan tahunan Human Development Report dengan nilai perolehan 80,65 %. Oleh sebab itu, sangat mungkin bahwa Sidoarjo sebagai kota incaran eks-HTI dalam melancarkan tujuan gerakan sosialnya.[5]

Melalui jalur tingginya mobilitas sosial pada lingkup pendidikan membawa keterlibatan Lembaga Dakwah Kampus di kampus-kampus besar Surabayalah seperti UNAIR, ITS, dan UNESA sebagai sumber peristiwa yang membawa HTI masuk di Sidoarjo melalui Pergerakan sejumlah kadernya dengan memanfaatkan sistem pertemanan dan beberapa acara antar sejumlah Lembaga Dakwah Kampus di Jawa Timur. [6]

Gerakan ini semakin berkembang pesat dan menguat dengan memperlihatkan berbagai kegiatan yang mereka adakan. Secara umum kegiatan

---

[5] Wikipedia, "Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021", www.bps.go.id, diakses 17 Januari 2022.
[6] Rahmat Nur Hakim, "Gerakan Islam Politik Fundamentalis: Kasus HTI di Surabaya", *Review Politik*, 209.
Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut meliputi isu seputar demo Palestina, isu kemiskinan, bahkan sampai mengadakan konferensi khilafah. Aktivitas utamanya adalah melakukan pengaderan tersistem dan terkonsentrasi dengan tujuan untuk menumbuhkan sistem kerangka gerakan Hizbut Tahrir, memperbanyak pengikut, dan membentuk kepribadian Islam dalam diri tiap individu yang tangguh untuk modal dalam menjajaki ranah pemikiran.[7]

Ketika mereka telah berkembang pesat, desus pemerintah akan membubarkan mereka dan mereka mengajukan banding kasasi. Namun, hal tersebut tidak mengubah keputusan pemerintah untuk membubarkan mereka. Dalam hal tersebut ditegaskan oleh Wiranto selaku menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat, pada Senin 8 Mei 2017. Mengungkapkan bahwa mereka telah melalui proses finalisasi yang cukup panjang dalam mempelajari, kemudian mengarahkan sesuai UU ORMAS dan sesuai ideologi negara Pancasila. Sehingga, Wiranto menyimpulkan bahwa keputusan tersebut telah melewati suatu proses pengkajian yang panjang.[8]

Bahkan setelah pemerintah membubarkan HTI, mereka tetap beraktivitas secara Islam politik melalui gerakan sosial termasuk di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Dalam pergerakannya sebelum era reformasi dimana tingginya tingkat negara menekan kelompok-kelompok Islamis, maka mereka bergerak dengan senyap melalui upaya kaderisasi dengan memanfaatkan naungan Lembaga

---

[7] Hizb al-Tahrir, *Manhaj Hizb al-Tahrir*,43. Dalam buku *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di* Indonesia, 47.

[8] Kristian Erdianto, "HTI Ajukan Kasasi terkait Pencabutan Badan Hukum oleh Pemerintah", https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia, diakses 18 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dakwah Kampus (LDK). Seperti halnya saat ini, setelah dibubarkan, mereka masih tetap eksis dan bergerak meskipun berada pada naungan berbagai lebel sejumlah komunitas baru dengan masih memegang ciri khas ideologi Khilafah Islamiyahnya.

Secara khusus penelitian ini membahas terkait cara menyusup dan arah baru gerakan sosial eks-HTI sebagai penggambaran kondisi politik dan struktur kesempatan yang mendorong eks-HTI menyusup dan membentuk anak cabang komunitas dakwah baru khususnya di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini berupaya dalam menyelesaikan dua permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, antara lain:

1. Bagaimana anggota eks-HTI Sidoarjo menyusup ke Masjid Al-Firdaus Sidoarjo?
2. Bagaimana arah gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo perspektif Doug MacAdam?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini menjelaskan cara menyusup beserta arah gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo menggunakan perspektif Doug MacAdam. Sehingga, arah gerakan tersebut menggambarkan kondisi politik seperti apakah yang mendorong anggota eks-HTI menyusup ke Masjid Al-Firdaus Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memunculkan manfaat baik dari segi teoritis keilmuan maupun dalam ranah penerapannya. Manfaat dari penelitian ini secara keilmuan adalah menjelaskan secara teoritis cara menyusup beserta arah gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo dalam menggambarkan kondisi politik yang seperti apakah yang mendorong mereka menyusup dalam komunitas REMAS Al-Firdaus Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut adalah sebagai upaya dalam membendung gerakan transnasional yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal tersebut, penelitian ini memberikan sumbangsih akademis terhadap bidang filsafat, sosial, dan pemikiran Islam. Penelitian ini juga mengharapkan mampu menjadi solusi dalam membendung berkembangnya kelompok transnasional yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Berikutnya, secara aspek fungsional praktis, penelitian ini mengharapkan sebuah pertimbangan bagi para kaum muda agar lebih selektif dalam mengikuti kajian ORMAS yang berorientasi pada gerakan Islamis. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan pertimbangan untuk sejumlah penelitian lanjutan, spesifiknya pada penelitian yang mengkaji bidang pemikiran Islam.

E. Kajian Terdahulu

Dalam penggambaran singkatnya, pada bab ini membahas terkait acuan penelitian awal yang menginspirasi peneliti dalam meneliti tema terkait gerakan sosial eks-HTI di Sidoarjo. Diketahui belum terdapat penelitian yang terfokus pada wilayah lokasi tertentu yang menjadi objek penelitian peneliti beserta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan teori gerakan sosial Doug MacAdam lebih spesifik pada teori struktur kesempatan politik sebagai alat analisis penelitian ini.

Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema gerakan sosial eks- HTI, di antaranya adalah:

1. Buku ilmiah karya Ainur Rofiq al-Amin dengan judul "Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia", bab 'Hizbut Tahrir dan Konstruksi Khilafah. Membahas tentang konstruksi khilafah di Indonesia menurut Hizbut Tahrir. Temuan penelitiannya adalah HTI menyimpulkan kebangkitan Islam akan terwujud bila terpenuhinya unsur, gerakan (*takattul*) yang sahih, partai (*Hizbi*), bersifat ideologis (*mabdai*) dan Islami berpikiran cemerlang, tariqah yang jelas, dan individu yang bersih.
2. Buku ilmiah karya Ainur Rofiq Al-Amin berjudul "Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir", secara garis besar buku ini membahas tentang kiat dalam menolak ideologi HTI melalui penyangkalan dengan argumentasi yang logis.
3. Buku ilmiah karya Ainur Rofiq Al-Amin berjudul "Kontranarasi Melawan Kaum Khilafers", secara garis besar buku ini membahas tentang upaya deradikalisasi melalui sejumlah wacana kritis.
4. Buku ilmiah karya Kalis Mardiasih dengan judul "Berislam Seperti Kanak-Kanak", bab 'Bagaimana Radikalisme Diturunkan?'. Membahas tentang dasar pewarisan paham radikalisme kepada seseorang. Temuan penelitiannya adalah radikalisme ternyata diturunkan melalui cara indoktrinasi.
5. Jurnal ilmiah karya Siti Fatkhiyatul Jannah dan M.Arif Affandi dengan judul artikel "Diskursus Negara Antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia di Jawa Timur". Membahas tentang konsep bentuk negara ideal bagi Indonesia menurut kalangan NU dan HTI. Temuan penelitiannya adalah NU lebih sepakat dengan negara dan agama adalah kesatuan namun berbeda (NKRI demokrasi). Sedangkan, HTI sebaliknya mereka lebih setuju negara dan agama adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (kesatuan khilafahnya).

6. Jurnal ilmiah karya Muhammad Firdaus dengan judul artikel "Konstruksi Makna Ideologi HTI: Studi Fenomenologi Tentang Makna Ideologi Khilafah dan Politik Aktivis Hizbut Tahrir di Pekanbaru". Membahas tentang konstruksi makna ideologi HTI menurut kajian fenomenologi terhadap HTI di Pekanbaru. Temuan penelitiannya adalah ada enam makna khilafah menurut HTI. *Pertama*, kepemimpinan universal muslim seluruh dunia. *Kedua*, pemerintahan Islam untuk muslim seluruh dunia. *Ketiga*, kepemimpinan universal dalam menerapkan syariat Islam. *Keempat*, kepemimpinan universal bagi umat Islam. *Kelima*, kewajiban bagi muslim. *Keenam*, keharusan antara hidup atau mati.
7. Jurnal ilmiah karya Muhsin Illya dengan judul artikel " Studi Gerakan Sosial HTI di Yogyakarta dalam Gerakan Penegakan Syariah". Membahas tentang konsep penegakan syariah menurut HTI di DIY. Temuan penelitiannya adalah Menurut HTI, segala aspek kehidupan itulah syariah. Syariat hanya dapat secara hakiki (*Kaffah*) diterapkan dalam kekhalifahan Islam.
8. Jurnal ilmiah karya Rahmat Nur Hakim dengan judul artikel "Gerakan Islam Politik Fundamentalis: Kasus HTI di Surabaya". Membahas tentang laju

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergerakan Islam politik HTI Surabaya. Temuan penelitiannya adalah secara kualitatif tentang keadaan politik yang mengawali pertumbuhan HTI di Surabaya, mulai penggambaran mobilisasi hingga *framing*. Hasil menunjukkan kemunculan HTI karena struktur politik, dipengaruhi mobilisasi dan kesadaran mereka dalam proses *framing*, yakni sebagai atribut sosial dan kesadaran anggota mereka dalam bertindak kolektif.

F. Kerangka Teori

McAdam menjelaskan bahwa teori proses politik atau teori struktur kesempatan politik, secara umum menitikberatkan pada adanya sinergi terhadap kedudukan ideologi dan sumber daya material dalam mendukung tercapainya suatu gerakan. Sehingga, teori proses politik dikatakan sebagai upaya kombinasi dari pandangan *mass society theory, relative deprivation theory,* dan *resource mobilization theory* yang secara bersama dan khusus dikembangkan menuju perspektif yang lebih historis dan politik.[9]

McAdam menjelaskan bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial dipengaruhi oleh tiga faktor determinan, yakni: kekuatan organisasi, pembebasan kognitif atau pola pikir, dan peluang-peluang politik. Teori proses politik secara khusus merupakan seperangkat sistem yang digunakan dalam melakukan analisa tentang kondisi politik tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap kemunculan, struktur, ruang lingkup dan keberhasilan suatu gerakan sosial. Dengan demikian, McAdam memandang gerakan sosial sebagai suatu fenomena politik.[10]

---

[9] Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016),195.
[10] Ibid.,196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metodologi Penelitian

Pada sub-bab ini akan diterangkan tiga hal terkait metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan akademis sebagaimana demikian di atas:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan ciri khas sifat deskriptif memerlukan analisis dalam proses menonjolkan makna dengan landasan teori sebagai acuan agar fokus penelitian yang bersifat objektif.[11] Sehingga, Secara objektif dijelaskan terkait cara menyusup beserta arah gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo untuk menjelaskan kondisi politik seperti apakah yang mendorong mereka menyusup ke Masjid Al-Firdaus Sidoarjo.

2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data pada skripsi ini berupa catatan data dan tindakan yang diperoleh dari observasi peneliti terhadap objek yang diteliti.[12] Sumber berupa hasil pengamatan terhadap anggota eks-HTI Sidoarjo yang saat ini masih aktif menyebarkan ide-ide gerakan di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Sehingga, metode pengumpulan data yang digunakan secara jelas adalah observasi untuk menjelaskan cara menyusup dan arah gerakan sosial eks-HTI di Sidoarjo.

3. Pendekatan

[11] Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 89.
[12] Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi, karena poin yang diteliti adalah permasalahan terkait perilaku, pemikiran dan hal *ihwal* suatu komunitas sosial tertentu.[13] Pendekatan ini untuk menjelaskan terkait cara menyusup dan arah gerakan sosial eks-HTI di Sidoarjo secara objektif.[14]

H. Sistematika Pembahasan

Kerangka penelitian yang berjudul "Gerakan Sosial Eks-Hizbut Tahrir Indonesia di Sidoarjo" peneliti akan menguraikan secara tersistematik dalam pembahasan bentuk bab. Berikut ini susunan dari pembahasan penelitian dalam bentuk bab demi bab.

Bab *pertama* menerangkan tentang beberapa hal pokok yang diperlukan peneliti sebagai panduan awal dalam mengarahkan dan mengetahui tujuan penelitian, pada bagian ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kajian terdahulu, metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang diteliti.

Bab *kedua* pada penelitian ini berfokus pada kajian teoritis gerakan sosial terkait konsep dan teori gerakan sosial perspektif Douglas McAdams. Pada bab ini juga sebagai titik fokus yang menggambarkan secara tersirat alasan peneliti memilih teori tersebut sebagai teori analisis penelitian ini.

Bab *ketiga* mengenal HTI Sidoarjo, pemaparan terkait gerakan sosial eks-HTI dan cara menyusupnya di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo, beserta membahas dampaknya.

---

[13] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009), 56-57.
[14] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *keempat* menerangkan tentang analisis pemikiran dari teori gerakan sosial Doug MacAdam tersebut dan merefleksikannya dengan bagaimana arah gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo, dalam menggambarkan kondisi politik yang seperti apakah yang mendorong mereka menyusup ke REMAS Muhammadiyah di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo.

Bab *kelima* menyimpulkan hasil temuan penelitian dan penyelesaian masalah penelitian. Sehingga, penelitian yang dilakukan memperoleh perihal penting yang patut direkomendasikan dalam model saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep dan Teori Gerakan Sosial McAdam

1. Gerakan sosial sebagai fenomena politik

Teori proses politik yang berkaitan dengan gerakan sosial pertama kali dikemukakan oleh Douglas McAdam dalam bukunya yang berjudul "*Political Process and the Development of Black Rebellion*" (1930-1970) sekitar tahun 1982. Istilah teori proses politik akrab dengan istilah pendekatan kesempatan politik atau struktur kesempatan politik.[15]

McAdam menjelaskan bahwa fokus sejumlah teori gerakan sosial lama seperti *mass society theory* dan *relative deprivation theory* hanya terpaku pada faktor internal berupa dinamika psikologis aktor gerakannya. Sedangkan *resource mobilization theory* atau teori mobilisasi sumber daya hanya terpaku pada faktor eksternal berupa sumber daya dan dukungan dari pihak luar, tanpa memberi perhatian terhadap faktor lingkungan politik yang memastikan terwujudnya suatu gerakan.

McAdam menjelaskan, bahwa teori proses politik atau teori struktur kesempatan politik secara umum menitikberatkan pada adanya sinergi terhadap kedudukan ideologi dan sumber daya material dalam mendukung tercapainya suatu gerakan. Sehingga, teori proses politik dikatakan sebagai upaya kombinasi

[15] David A. Locher, *Collective Behavior* (New Jersey: Prentice Hall, 2002),264. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pandangan *mass society theory, relative deprivation theory,* dan *resource mobilization theory* yang secara bersama dan khusus dikembangkan menuju perspektif yang lebih historis dan politik. Teori proses politik secara khusus sebagai seperangkat sistem yang terfokus dalam lingkup analisa tentang kondisi politik tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap kemunculan, struktur, ruang lingkup dan keberhasilan suatu gerakan sosial.

Gerakan sosial dipandang sebagai upaya rasional oleh kelompok untuk mendapatkan pengaruh yang cukup dalam memajukan kepentingan politik mereka. Semua gerakan sosial ditujukan untuk melawan penindasan kekuatan sosial dan politik. Namun, bentuk upaya rasional tersebut dilakukan dengan kerangka non-konstitusional atau tidak memasuki sistem politik formal misalnya parlemen, namun mereka melakukan upayanya dengan bentuk partisipasi politik non-konvensional misalnya demonstrasi. Sehingga, McAdam memandang gerakan sosial lebih cocok disebut sebagai suatu fenomena politik.

2. Kondisi pendorong keberhasilan gerakan sosial

Seperti halnya teori mobilisasi sumber daya, teori proses politik berfokus pada faktor keberhasilan suatu gerakan. Dalam hal ini, faktor politik dan ekonomi lebih penting daripada faktor personal. Teori proses politik juga lebih memusatkan perhatian pada faktor-faktor apa saja yang memungkinkan warga negara untuk membentuk gerakan sosial mereka sendiri dalam menentang masyarakat arus utama.

Sejumlah sosiolog menurut McAdam, mereka berpendapat bahwa teori proses politik didasarkan pada pandangan teoritis neo-Marxis karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menitikberatkan terhadap kekuasaan potensial revolusioner dari beberapa orang biasa, serta membenarkan bahwa sekelompok kecil elit lah sebagai pemegang kendali atas masyarakat luas.[16] Cakupan analisis dari pandangan neo-Marxis adalah berfokus pada kekuasaan dan konflik internal negara. Dalam hal ini, konflik antar kelas atau konflik internal negara seharusnya dipandang sebagai proses dialektis yang mendukung perkembangan masyarakat, serta sejumlah gejala politik yang ada seharusnya dipahami seperti halnya sebuah konflik antar kelas.[17]

Dalam menjelaskan teori proses politik secara aplikatif adalah mengarah pada kondisi ketika terdapat seseorang yang berusaha mengakses kekuasaan politik kemudian mempergunakannya atas dasar keperluannya secara pribadi atau kelompok mereka sendiri. Studi tentang proses politik adalah mengacu pada aktivitas-aktivitas partai dan sejumlah kelompok kepentingan, beberapa organisasi internal, karakteristik pembentukan putusan politik, serta peran dan motif para politisi.[18]

Teori proses politik memiliki fokus perhatian lebih pada koneksi politik dibandingkan pada sumber daya material. Sebuah fenomena politik lebih cocok digunakan dalam memandang dan menjelaskan sebuah gerakan sosial, dalam hal ini secara jelas bahwa gerakan sosial tidak bisa hanya dipandang sebagai fenomena psikologis seseorang. Gerakan sosial dikatakan sebagai usaha rasional dari kelompok dalam mendapatkan cukup pengaruh untuk menyukseskan

---

[16] Ibid, 265.
[17] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008) ,87.
[18] Abercrombie, Hill, dan Turner, *Kamus-Kamus Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 420-421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan politik mereka. Secara keseluruhan, tujuan gerakan sosial ditujukan sebagai upaya perlawanan terhadap politik dan penindasan sosial.

Pandangan Eisinger terkait konsep struktur peluang politik saat 1973 pada dasarnya sebagai orientasi pemikiran konsep struktur kesempatan politik McAdam. Sama halnya dengan konsep struktur kesempatan politik yang banyak digunakan saat ini, konsep struktur peluang politik McAdam banyak digunakan pada 1982. Struktur kesempatan politik diformulasikan untuk menganalisis tentang kondisi politik yang berpengaruh terhadap kemunculan, ruang lingkup, struktur, bahkan keberhasilan suatu gerakan sosial. Sejumlah tokoh pemikir ketika meminjam definisi dari konsep struktur kesempatan politik ini memunculkan kemungkinan dalam mengimplementasikannya secara umum saat melakukan analisis gerakan terhadap konteks karakteristik lokal. Struktur dikatakan memiliki sifat khusus karena pada setiap wilayah memiliki perbedaan dan tidak sedikit variasi pada waktu ke waktu.[19]

McAdam menjelaskan tiga faktor determinan pendorong keberhasilan gerakan sosial, yakni:[20]

a. Kekuatan organisasi.

Kekuatan organisasi adalah tingkat kondisi suatu organisasi yang merasa dirugikan dalam masyarakat. Sehingga, besar kemungkinan bagi berhasilnya gerakan sosial dipengaruhi oleh tingkat organisir dari suatu organisasi yang merasa dirugikan tersebut dalam mengupayakan sebuah tujuan tertentu.

---

[19] Wahlstrom dan Peterson, *Between the State and the Maarket Expanding the Concept of "Political Opportunity Structure"* (Oxford: ActaSociologica, 2006), 364. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial.*

[20] Locher, *Collective Behavior*, 265. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti pandangan teori mobilisasi sumber daya atau RMT, teori struktur kesempatan politik atau teori proses politik menurut McAdam terfokus pada keutamaan adanya organisasi sebagai pembentuk gerakan baru. Oleh karena adanya sebuah organisasi jenis apa pun akan membentuk struktur yang terdiri dari insentif atau nilai tambah solidaritas, jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. Kemudian, McAdam percaya bahwa adanya kelompok sosial akan dapat memberikan motivasi terhadap komunikasi sosial dan antar individu untuk mengambil bagian dalam kegiatan kelompok bersama anggota lainnya. Anggota kelompok yang tidak berpartisipasi dalam suatu gerakan kolektif dengan antar anggota yang lain akan merasa bersalah dan terhukum secara sosial. Namun, jika mereka berpartisipasi, mereka akan mendapatkan ganjaran berupa keuntungan secara sosial dan semakin merasakan kedekatan dengan anggota lainnya.

Masih terkait dengan struktur kesempatan politik, dalam memperkuat sejumlah penjelasan yang sebelumnya, bahwa menurut McAdam, Porta dan Diani secara umum menjelaskan bahwa organisasi gerakan sosial adalah organisasi identitas formal yang kompleks dengan tujuan tertentu atau sasaran tertentu yang diterapkan dalam gerakan sosial. Kemudian, diperkuat dengan definisi lain terkait organisasi gerakan sosial dijelaskan sebagai perkumpulan banyak orang yang mengutamakan syarat-syarat ideal dan moral tentang tata cara mengatur kehidupan individu atau kelompok orang yang terpojokkan dalam masyarakat.[21]

[21] Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembebasan kognitif.

Pembebasan kognitif didefinisikan sebagai persepsi pendorong terhadap kesempatan untuk berhasil dalam masyarakat. Dalam hal ini, mereka memanfaatkan kekuatan rasa percaya diri seseorang untuk mendorong rasa keinginannya agar semakin gigih dalam mencoba melakukan gerakan. Singkatnya, poin ini menjelaskan terkait cara seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar semakin ingin melakukan sebuah gerakan sosial.

Secara sederhana, konsep pembebasan kognitif membahas tentang sistem pengembangan gagasan melalui perasaan deprivasi relatif dalam meyakinkan adanya kondisi ketidakadilan yang harus diubah dengan cara melakukan suatu tindakan kolektif. Dalam pelaksanaan hal ini, para anggota potensialnya sebelum mengambil bagian dalam suatu gerakan, mereka harus selalu menanamkan rasa keyakinan terhadap kemampuan mereka dalam memutuskan bahwa tujuan mereka sesuai terhadap solusi struktural yang menjadi pilihan mereka. McAdam secara tersurat tidak mempergunakan kata deprivasi relatif dalam menjelaskan gagasannya pada poin ini. Namun, secara tersirat terdapat persamaan dalam gagasannya dengan kata di atas tersebut, bahwa ketika gerakan sebelum dimulai terlebih sebelumnya harus terdapat kelompok yang di dalamnya terdapat para aktor gerakan yang memiliki keyakinan dan keinginan, bahwa mereka akan mendapatkan suatu keuntungan dari tindakan kolektif tersebut.[22]

c. Peluang-peluang politik.

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesempatan-kesempatan politik didefinisikan sebagai *channel* yang menyediakan adanya kesempatan bagi suatu kelompok untuk menduduki suatu lingkungan politik yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin mampu suatu kelompok untuk bersatu di dalam arena politik, maka hal itu menimbulkan peluang yang besar juga untuk kelompok tersebut dapat berhasil dalam melakukan perubahan terhadap suatu sistem politik.

Kesempatan-kesempatan politik sebagai aspek yang lebih utama jika dibandingkan dengan aspek kekuatan organisasi dan aspek pembebasan kognitif. Karena, pada aspek kesempatan-kesempatan politik menjelaskan, bahwa suatu organisasi gerakan diharapkan mendapat dan memanfaatkan kekuasaan politik dalam kesempatan-kesempatan politik tersebut untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan hasil signifikan. Dalam konteks ini juga dijelaskan, bahwa gerakan sosial merupakan sebuah produk dari lingkungan politik dan sosial sekitarnya. Dengan demikian, jika terdapat sebuah perubahan sistem di lingkungan tersebut, maka hal tersebut akan mendorong kemunculan sebuah gerakan sosial.

Setelah membaca dari berbagai refrensi, McAdam, dkk. Berhasil mengidentifikasikan adanya empat penulis yang menjelaskan empat dimensi munculnya kesempatan politik bagi kemunculan gerakan sosial. Kemudian, McAdam, dkk. memberikan penjelasan yang sederhana untuk konseptualisasi tentang dimensi-dimensi kesempatan politik dari Brockett, Krisei, dkk., Rucht, dan Tarrow ke dalam empat dimensi yang berelasi dengan sistem sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

The social system, sebagai ranah penentu bagi layak atau tidaknya suatu gerakan kolektif untuk dapat bertahan, maka gerakan sosial diharuskan berhasil dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. McAdam dalam hal ini menjelaskan, dimana sebuah gerakan eksis terdapat empat dimensi dari kesempatan politik yang berelasi langsung dengan sistem sosial. Singkatnya, karena sistem sosial sebagai elemen penting yang berelasi langsung terhadap munculnya sebuah kesempatan politik, yakni:[23]

1) Relatif terbuka atau tertutupnya suatu kelembagaan sistem politik;
2) Stabil atau tidak stabilnya dari berbagai relasi antar kelompok yang berkuasa;
3) Ada atau tidaknya persekutuan antara sejumlah kekuatan elit dalam masyarakat; dan
4) Kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan tindakan menekan/represif.

Berdasarkan keempat dimensi di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kesempatan bagi terjadinya gerakan sosial adalah karena disebabkan oleh keterbukaan sistem politik. Sedangkan, meski disebabkan karena ketertutupan sistem politik namun hal tersebut justru menjadi pemicu bagi terjadinya sebuah gerakan sosial.

Dimensi stabilitas aliansi-aliansi elit dapat menjadi kesempatan bagi munculnya gerakan sosial, sedangkan instabilitas aliansi-aliansi elit akan menjadi penghambat bagi munculnya gerakan sosial. Dimensi adanya aliansi

[23] Locher,*Collective Behavior*, 267. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan elit juga menjadi kesempatan bagi munculnya gerakan sosial, sedangkan tidak adanya aliansi dengan elit akan menjadikan penghambat bagi munculnya gerakan sosial. Dimensi kapasitas negara dalam melakukan tekanan juga berpengaruh terhadap ukuran terjadinya gerakan sosial. Semakin besar kapasitas negara dalam menekan, semakin besar juga gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

Terkait cara pembacaan faktor-faktor tersebut bahwa, masing-masing dari faktor-faktor tersebut memiliki hubungan langsung dalam menentukan kadar kesempatan politik yang ada pada suatu gerakan sosial. Secara cakupan, keempat faktor tersebut berada di luar kendali sejumlah aktor anggotanya. Agar berhasil dalam mencapai tujuan gerakan, maka suatu gerakan harus berada dalam situasi dan tempat di mana faktor-faktor di atas tersebut mendukung.

Untuk menjelaskan kesempatan politik menurut McAdam yang memunculkan suatu gerakan, Soenyono menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Oman Sukmana, mengungkapkan bahwa untuk mengetahui sejumlah kesempatan politik sebagai pemicu bagi munculnya gerakan sosial adalah dijelaskan melalui dua pendekatan umum, yakni:1) *proximate opportunity structure;* 2) *state centered opportunity structure*.[24]

Pertama, *proximate opportunity* structure atau struktur kesempatan terdekat, pendekatan ini menjelaskan bahwa kesempatan politik bagi munculnya suatu gerakan sosial disebabkan karena suatu struktur kesempatan

[24] Sydney Tarrow, dalam McAdam, McCarthy, dan Zald, *Comparative Prespective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framings (*Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 41-44. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdekat. Dengan kata lain, poin ini dijelaskan sebagai pendekatan yang memberi perhatian berupa tanda yang diperoleh dari sejumlah kebijakan di lingkungan mereka atau berasal dari sejumlah perubahan yang terjadi pada sumber daya dan kapasitas mereka. Kemudian, secara spesifik pendekatan ini dibagi kembali menjadi dua jenis, yakni:[25]

1) *Policy Specific opportunities*, pendekatan ini menjelaskan bahwa kesempatan politik bagi munculnya suatu gerakan sosial disebabkan karena suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, atau karena pemerintah tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Dampak dari yang dilakukan pemerintah inilah sebagai pemicu bagi kesempatan untuk kemunculan suatu gerakan sosial. Kesempatan politik juga akan muncul karena akibat dari menurunnya legitimasi pemerintah, atau bahkan disebabkan karena masyarakat tidak lagi mengakui legitimasi Negara.
2) *Group-specific opportunities*, pendekatan ini menjelaskan bahwa, struktur kesempatan-kesempatan politik bagi munculnya gerakan sosial disebabkan karena akibat dari sejumlah perubahan yang terjadi dan dialami oleh sejumlah kelompok tertentu terkait tujuannya ataupun keberadaannya di masyarakat. Sejumlah perubahan yang dimaksudkan dalam hal ini sebagai pemicu terbentuknya aksi kolektif. Adapun sebab terbentuknya sejumlah perubahan tersebut karena dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya: politik, ekonomi, ideologi, perang, budaya, dll.

[25] Ibid,46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, *State centered opportunity structure*, pendekatan ini menjelaskan bahwa, struktur kesempatan-kesempatan politik disebabkan karena perihal tentang negara dan semua aspek yang ada di dalamnya sebagai sumber terjadinya kesempatan-kesempatan yang dapat memunculkan aksi kolektif. Secara khusus, pendekatan ini dibagi kembali menjadi dua jenis, yakni:

1) *Cross-sectional statism*, pendekatan ini menjelaskan, bahwa kesempatan politik bagi munculnya suatu gerakan sosial disebabkan karena, negara dianggap sebagai wahana persaingan antar berbagai kelas sosial, serta status dan terjadinya konflik-konflik politik.
2) *Dynamic statism*, pada pendekatan ini menjelaskan, bahwa struktur kesempatan-kesempatan politik bagi munculnya gerakan sosial terjadi karena adanya pengaruh terhadap sejumlah perubahan yang terjadi dalam suatu negara beserta diikuti pengaruhnya terhadap para aktor gerakan sosialnya.

McAdam, dkk. sebagaimana mengutip Tarrow. menjelaskan bahwa, semua sistem politik mengalami sebuah perubahan yang pada waktunya akan mengubah lingkungan sejumlah aktor sosialnya. Kemudian, dampak perubahan tersebut akan memberikan pengaruh kuat terhadap langkah awal, bentuk-bentuk, dan hasil dari tindakan kolektif.[26]

McAdam, dkk, terhadap keempat dimensi kesempatan politik tersebut kemudian menyimpulkan bahwa, keempat tokoh Brockett, Krisei, dkk., Rucht, dan Tarrow tersebut menurutnya telah lupa memberi perhatian pada pentingnya

[26] Sydney Tarrow, dalam McAdam, McCarthy, dan Zald, *Comparative Prespective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*, 41-44. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran kritis sebagaimana bekerjanya berbagai kecenderungan dan sejumlah peristiwa internasional dalam memberikan pengaruh terhadap kemunculan kesempatan politik pada tingkatan domestik.

McAdam lebih lanjut menjelaskan bahwa perhatian pada pentingnya proses politik dan ekonomi global adalah pendorong dalam memberikan pengaruh terhadap pembentukan struktur sejumlah kemungkinan bagi tercapainya gerakan sosial dalam tingkat lokal atau domestik. Terkait hal ini, McAdam secara tegas mengungkapkan bahwa para pemikir gerakan sosial saat ini telah lalai dalam memberikan perhatian pada ranah tersebut dalam mencari sudut pandang suatu gerakan sosial.[27]

Kritik yang diutarakan McAdam, dkk. memperkuat argumen dari sejumlah ahli gerakan sosial seperti Ezza S. Layton, membahas terkait utamanya konteks global dari membludaknya kemunculan suatu gerakan sosial di berbagai negara. Dalam judul disertasinya ”*The International Context of the US Civil Rights Movement: the Dynamics between Racial Policies and Internasional Politics,* 1941-1960”, McAdam menjelaskan bahwa, Layton dalam karya ilmiahnya yang terinspirasi dari perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tersebut menjelaskan bahwa, suatu perang dingin di dalamnya terdapat peran penting dalam mempengaruhi dinamika kehidupan politik dalam negeri dan adanya pembludakan gerakan anti-rasisme di Amerika serikat sebelum terjadinya Perang Dunia II. Selanjutnya, Layton menjelaskan bahwa sebab kemunculan aliansi elit politik baru dan keterbukaan institusi

[27] McAdam, Tarrow, *Dynamics of Contention* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 115. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan di Amerika Serikat tersebut muncul karena disebabkan oleh akibat dari adanya perang dingin tersebut.[28]

Sebelumnya, menurut McAdam telah dijelaskan oleh Theda Skocpol seorang ahli teori revolusi yang menyampaikan pendapat yang serupa dengan Layton. Melalui karyanya, Skocpol mengatakan bahwa terputusnya dukungan sumber daya internasional ketika justru suatu negara sedang masuk dalam tahap kelanjutan dari proses modernisasi yang sedang dilaksanakan dengan menggantungkan dirinya pada sistem internasional itulah menurut Skocpol sebagai kondisi yang memunculkan situasi revolusioner. Situasi revolusioner yang seperti inilah yang menurut Chalmer Johnson akan memunculkan situasi deflasi kekuasaan beserta merosotnya otoritas pusat kekuasaan yang dipahami sebagai dua bentuk kesempatan politik sebagai pendorong munculnya suatu gerakan sosial yang sangat utama.

Pendapat Skocpol menurut McAdam di atas, kemudian dikuatkan oleh Noreena Hertz sama seperti dengan Skocpol berpendapat tentang utamanya memahami konteks global sebagai pendorong berkembangnya kesempatan politik terhadap munculnya sebuah gerakan sosial. Hertz secara jelas menjelaskan bahwa terdapat suatu sebab dalam bentuk realita yang jelas berupa kondisi banyaknya pemerintah dan rakyat mereka di berbagai belahan dunia yang kehilangan kekuasaan dalam merumuskan sejumlah kebijakan nasional mereka. Dikatakan demikian, sehingga akibatnya kebijakan-kebijakan nasional negara-negara tersebut semakin tidak bisa mengakomodasi dan

[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan sejumlah kepentingan rakyat mereka. Hertz kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa sebab-akibat tersebut berasal karena pengambilalihan otoritas negara oleh kekuatan korporasi-korporasi transnasional dan hal tersebut juga sebagai pendorong kesempatan bagi terjadinya situasi pengambilalihan otoritas negara yang dilakukan oleh kekuatan korporasi-korporasi transnasional.

3. Sumber koneksi politik gerakan sosial

Studi tentang gerakan sosial yang telah ada pada umumnya hanya fokus terhadap sebuah latar belakang dan terkait bagaimana aksi kolektif terjadi, namun pada sisi lain, politik gerakan itu sendiri dan hasil politis aksi kolektif menurut McAdam kurang mendapat perhatian. Sehingga, hasil analisis hanya dominan menjelaskan persoalan struktural dan organisasi internal dari gerakan-gerakan tersebut, serta sedikit dalam menjelaskan aspek relasional dan kontekstual sebagai aspek utama yang sangat dibutuhkan dalam memahami suatu dinamika politik dalam negeri.

Kemudian, untuk membahas isu tersebut, maka McAdam pada bagian ini juga akan menjelaskan tulisan terkait gerakan sosial yang berhubungan dengan konseptualisasi kekuasaan menurut pandangan Bourdieu yang berisi argumentasi dasarnya, bahwa praktik-praktik sosial dan kekuasaan dalam melakukan tindakan haruslah menjadikan perintah tertulis dari para aktor gerakan sebagai landasannya untuk bertindak (habitus), berbagai jenis modal dalam bentuk modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dll, yang dimiliki oleh mereka dan bidang misalnya bidang politik dimana praktik tindakan tersebut terlaksana. Dalam konsepsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik sosial ini berupaya mengungkapkan gambaran sejumlah sumber utama kekuasaan, jika dilihat dari sudut pandang posisi, maka hal tersebut ditentukan oleh kuantitas maupun komposisi modal yang dimiliki pemegang posisi yang berbeda-beda. Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang kekuatan, maka hal tersebut ditentukan berdasarkan hubungan dominasi, kesetaraan posisi yang berbeda dalam bidang tersebut. Sehubungan dengan aksi kolektif tersebut, maka konsep umum tentang kekuasaan adalah berkaitan erat dengan kesadaran struktur kesempatan politik yang khusus atau dijelaskan secara singkat sebagai relasi dalam bidang politik, struktur mobilisasi atau modal sosial, kerangka budaya atau modal simbolis dan identitas bersama atau habitus.[29]

Sumber utama kekuatan berada dalam sebuah relasi gerakan dengan institusi bidang politik dan aktor-aktor gerakan. Menurut McAdam, pandangan Tarrow melihat bahwa untuk mencapai tujuan, suatu gerakan sosial memanfaatkan struktur kesempatan politik yang ada, di mana struktur kesempatan politik tersebut bersifat kompleks dan dinamis. Secara umum dapat digarisbawahi berupa terkait pentingnya hak-hak formal dan institusional dalam sistem politik, semisal terkait adanya hak konstitusional dan institusi penjunjung hak-hak tersebut. Meskipun institusi dan hak dapat menjadi sebuah kerangka formal yang digunakan dalam berpartisipasi, tampaknya koneksi dan relasi politis ternyata lebih menentukan untuk pemberi akses dan transformasi yang sebenarnya terhadap hak dan institusi. Para pemikir bidang gerakan sosial juga menekankan pernyataan, bahwa gerakan sosial berada di dalam konteks politik kerja sama dan

[29] Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetisi dalam masyarakat, sebagai yang merefleksikan antara hubungan informal dan formal di antara dan dalam organ-organ masyarakat sipil.[30]

Keluwesan gerakan sosial dalam mampu memobilisasi individu ataupun kelompok pada suatu masyarakat juga termasuk sebagai sumber kekuatan politik lain. Tokoh pemikir gerakan sosial mengartikan pemahaman tentang struktur mobilisasi sebagai bentuk upaya dalam mengonseptualisasi sebuah jaringan sosial dan institusi yang berperan sebagai struktur sosial bagi mobilisasi kolektif dan institusi yang berperan sebagai struktur sosial bagi mobilisasi kolektif beserta sebagai penjelas bentuk organisasi dalam suatu gerakan. Kemudian, struktur mobilisasi dapat bersifat informal bahkan formal dan pada umumnya hal yang sering terlewatkan kita sadari seperti contoh jaringan pertemanan adalah sudah dikatakan sebagai sebuah struktur. Struktur mobilisasi informal termasuk juga meliputi jaringan aktivis dan masyarakat senasib sepenanggungan. Dengan demikian, infrastruktur sosial seperti itulah yang dapat memfasilitasi komunikasi dan solidaritas sebelum dan hingga mobilisasi kolektif telah berjalan.

Kesanggupan partisipasi gerakan sosial saat memperjuangkan arti hak, isu, aktor dan kebijakan disebut sebagai kekuatan tambahan. Gerakan sosial dalam "memberikan makna terkait ketidakadilan serta pelanggaran terhadap kelayakan berlandaskan budaya yang ada."[31] Kerangka budaya terkait ketidakadilan dan cita-cita politik serta terkait hak dan kewajiban telah mengalami berbagai uji tes yang secara terus selalu bisa berubah. Artinya, terdapat suatu proses kerangka strategis yang aktif serta kompetitif sedang terjadi pada berbagai arena, termasuk di dalam

[30] Dela Porta dan Diani, *Social Movements an Introduction*, 34. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial.*
[31] *Oman Sukmana, Konsep Dan Teori Gerakan Sosial, 203.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan sosial tersebut, ataupun di antara aktivis dan otoritas sebagai model simbolis adalah agar memperoleh pengakuan sebagai perwakilan resmi suatu kelompok tertentu.

Untuk poin akhir, dijelaskan bahwa tindakan kolektif sebagai cerminan dari identitas diri atau kebiasaan para aktor. Partisipasi individu dalam hal ini tidak berlandaskan pada realita yang ada, namun berlandaskan pada persepsi berserta interpretasi dari realitas tersebut. Gerakan sosial tersebut memiliki peran yang aktif untuk membangun dan mengkomunikasikan suatu identitas bersama. Pada pengalaman sebelumnya, menunjukkan bahwa adanya pemberian fasilitas dan pemberian kerangka bagi mobilisasi bentuk baru oleh sebuah politik oposisi , tanpa sedikit pun memanfaatkan unsur budaya yang telah ada terkait cara-cara untuk protes dan berorganisasi. Dengan demikian, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip kolektif dan prinsip-prinsip organisasi aksi dalam kebiasaan atau habitus merupakan sumber utama kekuatan aksi kolektif.

McAdam mengutip konseptualisasi umum Bourdieu terkait kekuasaan dan tingkat pemahaman yang lebih dalam terhadap teori gerakan sosial, sejumlah konsep tersebut sebagai pemberi basis dalam menganalisis ranah politik gerakan sosial. Secara sederhana, McAdam juga mengutip pandangan Tornquist dalam menguatkan argumennya dalam mengidentifikasi tiga isu utama dalam studi politik gerakan sosial, adalah: 1) di mana bidang politik yang dipilih aktor; 2) apa isu dan kepentingan yang didengarkan dan dipolitisir; 3) bagaimana masyarakat dimobilisasikan ke dalam gerakan politik dan bidang politik.[32]

[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GERAKAN SOSIAL EKS-HTI DI SIDOARJO

A. Mengenal HTI Sidoarjo

Hizbut Tahrir muncul di al-Quds Palestina pada tahun 1953. Pada awal tahun 1953, HT mengajukan izin pendirian partai politik kepada Departemen Dalam Negeri Pemerintah Yordania. Namun usaha mereka tersebut belum membuahkan hasil dan berujung pada penolakan karena larangan dan dipandang ilegal.[33]

Orientasi berdirinya Hizbut Tahrir (HT) dapat disorot melalui sisi historis dan normatif. Secara historis, HT memandang keterpurukan umat Islam dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sejak abad ke-19 M , peradaban Islam berada dalam keterpurukan disebabkan karena dominasi penjajahan bangsa Barat. Dalam kondisi tersebut, tidak sedikit gerakan Islam yang berupaya menyelamatkan nasib umat Islam saat itu. Namun, alih-alih menyelamatkan, Hizbut Tahrir menilai mereka semakin meningkatkan keterpurukan umat Islam. Adapun secara normatif, Hizbut Tahrir berdiri dalam tujuan membenarkan dan menyambut firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104.[34]

الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ
الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَٰئِكَ

[33] Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, 21-22.
[34] Ibid,23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."[35]

Hizbut Tahrir dicetuskan Taqiyuddin An-Nahbani. Setelah meninggal pada tahun 1977, kepemimpinan Hizbut Tahrir berikutnya dilanjutkan oleh 'Abd al-Qadim Zallum hingga tahun 2003, kemudian oleh 'Atha Abu Rashthah hingga tahun 2011. Pelantikan Atha Abu Rashthah dilaksanakan pada 13 Juni 2003 oleh Dewan *Mazhalim*.[36]

Di Indonesia, gerakan ini datang ke Indonesia sekitar tahun 1980, dengan tokoh pemuka salah satunya Abdurrahman Al-Baghdadi. Anggapan Ismail Yusanto, Hizbut Tahrir juga masuk ke Indonesia tahun 2000. Gerakan ini mulanya eksis pada muka publik melalui Kongres Internasional Khilafah Islamiyah yang digelar di Jakarta dengan melabeli diri dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).[37]

Kemudian, HTI merambah masuk ke sejumlah wilayah Indonesia dengan meluas dan berkembang pesat, terutama pada sejumlah kota di Indonesia dengan kampus-kampus terkenal pada sekitar tahun di atas 2000. Fakta bahwa HTI masuk di Sidoarjo berdasarkan salah satu data yang peneliti temukan diketuai oleh Ustaz

---

[35] Al-Qur'an, 3:104.
[36] Ibid, 24.
[37] Muhammad Ismail Yusanto, "Kebangkitan Islam Menantang Modernisasi dan Globalisasi", *Al-Wa'i* no. 67 tahun VI (Edisi Khusus Maret 2006), 57. Dalam buku *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Furqon, melalui ungkapan Kapten Inf Ghofur Urrokhim selaku pejabat di Koramil Sidoarjo ketika menemui kunjungan ustaz HTI tersebut pada 21 April 2016.[38]

Tidak dapat dipisahkan dari proses perjalanan penyebaran ide gerakan yang mulanya bergerak dari HTI Surabaya sebagai pusat terdekat dari Sidoarjo dengan cakupan lingkup Jawa Timur, HTI Surabaya terinspirasi pola ide gerakan pemanfaatan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang pertama kali diusung di Bogor sebagai kota pelopor HTI pertama kali muncul di Indonesia. Menyambung hal tentang perjalanan HTI Sidoarjo, maka keterlibatan LDK di kampus-kampus besar Surabayalah seperti UNAIR, ITS, dan UNESA sebagai sumber peristiwa yang membawa HTI masuk di Sidoarjo melalui arus pergerakan sejumlah kadernya dengan memanfaatkan sistem pertemanan dan beberapa acara antar sejumlah Lembaga Dakwah Kampus di Jawa Timur dengan jangkauan lintas kota pada satu provinsi.[39]

B. Gerakakan Sosial eks-HTI di Sidoarjo

Gerakan sosial berbasis Islam politik anggota HTI pada awalnya mengarah terhadap upaya penyusupan pada lembaga formal politik pemerintahan DPR-RI melalui pengajuan banding kasasi ketika mereka merasa terancam akan dibubarkan, hal ini bertujuan agar para rezim negara melindungi lingkup kepentingan HTI sebagai ORMAS legal yang berorientasi pada cita-cita tegaknya sistem Khilafah Islamiyyah di Indonesia. Dalam hal ini, HTI sebagai ORMAS

[38] Kodim 0816 Sidoarjo, "Silaturahmi Pengurus HTI di Koramil Sidoarjo", http://kodim0816-sidoarjo.com/detailpost/silaturahmi-pengurus-hti-di-koramil-081601-sidoarjo, diakses 15 September 2020.
[39] Rahmat Nur Hakim, "Gerakan Islam Politik Fundamentalis: Kasus HTI di Surabaya", *Review Politik*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada awalnya memanfaatkan sistem demokrasi Indonesia, sebagai wadah dan ruang gerak mereka dalam melancarkan aksi mereka secara perlahan dalam melakukan injeksi ideologi Khilafah Islamiyah untuk melumpuhkan sistem demokrasi di Indonesia secara pasif. Hal tersebut mereka lakukan atas landasan historis, bahwa sistem demokrasi tersebut dari, untuk dan oleh golongan bangsa Barat, namun sistem politik tersebut bukan untuk seharusnya diikuti masyarakat muslim Indonesia. Bagi mereka, demokrasi sebagai suatu sistem politik pemerintahan saat ini di Indonesia yang belum menjadi sistem politik yang ideal, jika dibandingkan dengan sistem Islam politik sebagai representatif penggambaran kejayaan Islam masa kini seperti halnya kejayaan khilafah yang tidak tertandingi pada masa Dinasti kekhalifahan terdahulu.

Menurut Fealy dan Bubalo berdasarkan historis, *channel-channel* utama transmisi pemikiran Timur Tengah ke Asia Tenggara adalah gerakan sosial. HTI bersamaan dengan konsep negara menurut usulannya secara esensial menolak kenegaraan modern atau sekuler, karena untuk membebaskan umat dari berbagai ide kufur, dan membebaskan mereka dari dominasi serta pengaruh dari sejumlah negara yang dianggap "kafir".[40] Dengan demikian, model khilafah mereka yakini sebagai satu-satunya solusi bagi umat Islam, sebagai pemahaman dan standar acuan dalam mengakomodasi kepentingan rakyat. Bagi anggota HTI, *kaffah*-nya syariat Islam sebagai suatu sistem ideal dalam segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya terkait urusan politik. Kemudian, hal tersebut dikuatkan oleh Ainur Rofiq melalui yang disampaikan Djamaludin Mirri selaku simpatisan HTI

[40] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan, bahwa penerapan dan pelaksanaan syariah lebih efektif jika diterapkan dalam bentuk negara Islam atau khilafah. Sejalan dengan hal tersebut, mendorong HTI untuk membentuk dan menjalankan Islam politik secara *kaffah* di Indonesia dalam lingkup pemerintahan maupun non pemerintahan. Bagi anggota HTI, Meskipun Rasulullah tidak pernah menyerukan untuk mendirikan Negara Islam, namun dengan representatif semangat Islam politik mereka saat ini, sehingga mereka mendeklarasikan diri sebagai komunitas penerus semangat perjuangan Rasulullah dalam menegakkan nilai-nilai Islami terutama dalam lingkup politik yang menegakkan suatu Negara Kesatuan Khilafah Indonesia. Dari sebab pernyataan tersebut menjadikan HTI sebagai ORMAS yang gencar dalam menegakkan sejumlah nilai keislaman di Indonesia, dengan berbagai cara mereka dalam menyuarakan Islam Indonesia jaya dengan syari'ah komprehensif. Dalam hal ini, HTI melakukan suatu gerakan sosial dengan orientasi Islam politik dalam lingkup non-pemerintahan dapat dikatakan sangat leluasa menambah jumlah anggota mereka dengan mengakomodasi orang-orang yang fanatik terhadap nilai-nilai Islam dalam mendukung aksi mereka untuk membentuk suatu negara khilafah yang kecewa terhadap demokrasi di Indonesia.[41]

Semangat mereka dalam menegakkan nilai-nilai Islam politik, mereka wariskan dengan jalan indoktrinasi. Adapun jalan mereka dalam merealisasikan gerakan Islam politik mereka yakni dengan cara, membangun sejumlah sekolah SDIT yang didirikan oleh Ismail Yusanto selaku juru bicara HTI saat itu, rutin mengadakan kajian-kajian yang disebut *halaqah*, serta ikut dalam aksi bela tauhid

[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

212. Dalam prinsipnya, gerakan sosial HTI yang berpedoman pada Islam politik pada akhirnya mendapatkan perlawanan yang sengit dari sejumlah rezim pemerintah yang tidak sependapat dengan mereka dan atas aspirasi keluhan masyarakat. Upaya anggota eks-HTI dalam melakukan penyusupan pada lembaga politik pemerintahan DPR-RI dapat dikatakan tidak berhasil secara total. Sehingga, pada akhirnya pemerintah memunculkan surat layang berpasal 12 Nomor (2) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang mengharuskan HTI harus mau membubarkan diri meskipun tanpa terselesaikan melalui jalur pengadilan pemerintah.

Foucault menjelaskan, bahwa setiap suatu diskursus legal, maka terdapat suatu diskursus alternatif. Diskursus lahir dari dua bentuk yang berbeda. Pertama, *within the Dominan discourse* yakni mengonter diskursus dominan namun masih dalam diskursif *field* atau wilayah yang sama. Kedua, *outside the dominan discourse* yakni mencetak diskursif alternatif, di luar ideologi dominan menurut Jacky. Berlandasan hal tersebut, maka dalam hal ini di Sidoarjo, contohnya NU sebagai organisasi terbesar menduduki wilayah diskursus dominan dengan penerapan model negara berlandaskan pada kondisi politik Indonesia pada saat ini. Sedangkan HTI sebagai komunitas yang memosisikan diri dalam suatu diskursus alternatif dengan mengusung konsep negara Islam dengan pemerintahan dipimpin oleh khalifah di Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam. Terkadang, menurut peneliti karena kekecewaan tertentu yang dialami beberapa orang terhadap sistem demokrasi yang ada, hal tersebut menjadikan mereka menganggap bahwa HTI sebagai diskursus alternatif yang tepat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentang sistem tersebut.[42] Terkait hal ini, aktivis eks-HTI Sidoarjo yang akrab dipanggil Mbak Bibi yang masih aktif bergerak menyebarkan ide gerakan secara online di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo tersebut, juga menyatakan bahwa,

Eks-HTI merasa semua yang dilakukan pemerintah itu tidak adil. Mereka memberikan kesempatan kepada non-Islam beserta ide-ide sekulernya yang notabenenya adalah musuh Islam yang jelas, untuk berkuasa dalam mengendalikan lingkup politik dalam negeri yang mayoritas muslim. Padahal sejauh ini anggapan mereka, upaya yang dilakukan adalah menyuarakan bahkan memperjuangkan aspirasi umat. Terkait alasan HTI dibubarkan pun, juga tidak dijelaskan melalui fakta kasus yang jelas, salah satunya ketika media di mana-mana memberitakan menuduh HTI anti-Pancasila yang tanpa bukti. HTI mempertanyakan klaim media terkait upaya HTI membela Islam ketika dihina termasuk anti-Pancasila. Di samping itu kekecewaan HTI tampak karena dakwah HTI yang belum bisa dibuktikan dengan menggunakan kekerasan tersebut tidak diberikan ruang oleh pemerintah .[43]

Akibat dari kegagalan HTI dalam menyusup pada sejumlah lembaga politik pemerintahan mapan. Tidaklah heran jika saat ini pergerakan eks-HTI bergeser dengan cara menyusup ke sejumlah lembaga ORMAS Islam yang mapan di setiap daerah yang pernah mereka tuju. Adanya fokus pergeseran bidang terhadap wadah pergerakan yang mereka incar terlihat jelas, pada awalnya mereka menyusup langsung pada wadah politik lembaga pemerintahan DPR-RI. Namun, saat ini setelah dibubarkan, anggota eks-HTI lebih aktif bergerak melalui wadah

[42] Ibid, 35.
[43] Bibi (aktivis eks-HTI Sidoarjo), *Observasi*, Sidoarjo 7 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial dengan menarik simpati masyarakat sebanyak-banyaknya secara terselubung menyusup dalam ORMAS Islam yang mapan di setiap daerah di Indonesia. Khususnya adalah di komunitas Remaja Masjid Muhammadiyah Al-Firdaus, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Melalui cara mereka juga terlihat tetap mendirikan suatu komunitas muslim, terkait kajian bertemakan muslimah, hingga terkait manajemen pendidikan Islam. Namun, hal tersebut mereka lakukan dengan menyembunyikan bekas label HTI mereka dengan menarik simpati jemaah dan REMAS Al-Firdaus agar mengikuti kajian dan setiap acara yang mereka adakan. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Mbak Sakinah selaku eks-simpatisan HTI Sidoarjo, yang dahulu rutin mengikuti kajian umum HTI ketika dirinya masih duduk dibangku kuliah di UNESA, menyatakan bahwa,

Buletin *kaffah* yang disebarkan Mbak Bibi ke lingkup Masjid Al-Firdaus Sidoarjo adalah milik eks-HTI dan sejauh ini dia tahu, Mbak Bibi juga masih aktif bergerak di komunitas lain, ketika dia tanyakan aktivitas dakwahnya selain di Al-Firdaus. Mbak Sakinah katakan tersebut, karena Mbak Bibi masih aktif memberikan buletin tersebut dengan pembahasan yang selalu baru namun dengan judul buletin yang masih sama seperti dulu yang sering dibaca Mbak Sakinah ketika masih ikut kajian HTI.[44]

Gerakan Sosial anggota eks-HTI dalam melancarkan gerakan sosial mereka melalui menyusun sebuah acara kajian yang rutin mereka bentuk bertemakan Islam yang *kaffah*. Khusus bagi mereka selaku pengendali dalam

[44] Sakinah (Eks-Simpatisan eks-HTI), *Observasi*, Sidoarjo 29 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkuasa memegang kendali atas berjalannya acara kajian tersebut. Karena, mengingat struktur kaderisasi saat ini mengalami suatu perombakan dalam menyusun suatu rencana dan progres baru mereka untuk tetap melanjutkan cita-cita Islam politik mereka dengan melalui kebaruan tantangan yang mereka alami setelah pembubaran mereka oleh rezim pemerintah yang tidak sependapat dengan mereka. Kemudian, karena keseragaman ideologi gerakan Islam politik dan tujuan dari ORMAS tersebut tetap mendirikan suatu wadah komunitas bagi para anggota eks-HTI dalam bergerak untuk menarik anggota ORMAS Islam lain yang mapan di Sidoarjo agar bergabung dengan mereka. Dengan demikian, label baru komunitas kajian umum yang diadakan para anggota eks-HTI tersebut menunjukkan, bahwa mereka sedang mengupayakan sebuah "kekuatan koneksi politik" mereka untuk menentang arus demokrasi yang sudah mengakar kuat pada Pancasila dan jati diri muslim Indonesia.

1. Taktik menyusup eks-HTI Sidoarjo

Menurut Ainur Rofiq Al-Amin, mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa organisasi Hizbut Tahrir memiliki bakat yang baik dalam mempromosikan sekaligus melindungi misi khilafahnya dengan berbagai strategi mereka. Menurut nya, ketika ia mengikuti *halaqah,* ketika nama organisasi gerakannya masih Hizbut Tahrir (HT) di mana saat itu masih zaman Orde Baru. Dalam konteks tersebut, tegas bahwa kewaspadaan merupakan kunci utama mereka dalam mengupayakan tujuan politik mereka. Di mana dalam hal tersebut. *Pertama*, mereka cukup waspada dalam menyelenggarakan *halaqah*-nya. *Kedua*, cukup waspada juga dalam hal menjaga kerahasiaan eksistensi buku-buku otoritas HT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dari kedua jenis kewaspadaan tersebut adalah agar keduanya tidak terdeteksi oleh para penguasa.[45]

Mereka tidak menafikan demonstrasi tapi tetap mempergunakannya dengan nama lain *masirah*, atas pertimbangan bahwa misi khilafah akan lebih efektif dan dikenal ketika mereka mampu tampil di muka publik.[46]

Selain kewaspadaan terhadap penguasa, aktor gerakan HT juga "kekinian" dalam mengamati dan mengambil sikap terhadap sejumlah gerakan Islam lain di luar mereka. Dalam hal ini para aktor eks-HTI Sidoarjo memanfaatkan salah satu masjid yang sepi jemaah untuk mereka tunggangi dalam penyebarluasan doktrin ajaran mereka. Di mana di tempat desa peneliti tinggal, memang selama peneliti menjadi jemaah di Masjid Al-Firdaus Kecamatan Gedangan tersebut, jarang melihat jemaah yang berasal dari lingkup internal penduduk yang berasal dari desa setempat, menurut peneliti. Kebanyakan jemaah yang datang justru berasal dari luar Desa Punggul, bahkan luar Kecamatan Gedangan dan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, hal tersebutlah yang memberikan besar kesempatan bagi pengaruh masuknya paham asing di luar konsep ajaran Muhamadiyyah. Mengingat, pengelolaan kegiatan masjid yang saat itu juga aktif dikelola oleh kaum muda-mudi kampus yang masih kuliah berasal dari berbagai kecamatan bahkan kota. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan McAdam dengan mengutip Oberschall, bahwa semakin tersegmentasi kelompok tertentu pada masyarakat, maka akan memunculkan kemungkinan besar untuk dimobilisasi

[45] Ainur Rofiq Al-Amin, *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*, 190.
[46] Ibid,192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam gerakan sosial.[47] Secara terkonteks, dijelaskan bahwa hal tersebut karena penganut Muhammadiyah yang minoritas di daerah tersebut sebagai sumber kesempatan bagi masuknya eks-HTI Sidoarjo melalui lingkup organisasi gerakan sosial.

Selanjutnya, faktor adaptasi terkait cara berpakaian juga tidak mereka lupakan dalam hal memperkuat daya tunggang mereka terhadap pihak yang dimanfaatkannya. Kembali memandang pada kejadian yang diamati oleh peneliti, bahwa selama ini para aktor gerakan eks-HTI Sidoarjo, cara berpakaian muslimah mereka tidak jauh berbeda dengan para pengikut ormas Muhammadiyah di Sidoarjo. Mereka sama-sama mengenakan baju *syar'i* dengan hanya jilbab menjulur hingga ke dada, tidak lupa selalu berkaos kaki.

Secara esensi, mereka gerakan yang mengarah pada wajibnya kembali pada ajaran Nabi dan Salafus sholih terutama dalam menyikapi aspek politik dalam ranah beragamanya.[48] Namun, mereka melupakan penyertaan pentingnya diikuti cara pandang NKRI dan Pancasila dalam bekerja sama untuk mengamalkan kebijaksanaan berpolitik menurut tata cara Islam yang *rahmatan lil alamin*, guna mencari keberkahan *hablum minallah* dan juga *hablum minannas*.[49]

Selanjutnya, eks-HTI Sidoarjo dalam hal cara adaptasi-kamulflasenya untuk memperkuat daya tunggang mereka, maka kelihaian mereka menguasai ruang komunikasi yang terbuka dalam berdiskusipun, menjadikan mereka mampu dalam mengait ormas lainnya, seperti Muhammadiyah. Oleh karena hal ini terjadi disebabkan karena mereka sangat telaten dalam mengelola dan memanfaatkan

[47] Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, 175.
[48] Ainur Rofiq Al-Amin, *Kontra Narasi Melawan Kaum Khilafers*, 98.
[49] Ainur Rofiq Al-Amin, *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*,194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaringan pertemanan untuk selanjutnya mereka jadikan sebagai jaringan gerakan, sehingga mudah diajak masuk HTI dalam memperkuat argumen khilafah Islamiyah mereka.

Sehingga, dalam mengupayakan sebuah tujuan bersama melalui ketelatenan mereka dalam mengelola dan memanfaatkan jaringan komunikasi pertemanan secara personal**,** jika lingkup subjek sasaran di dalamnya tidak ada penolakan paham HTI, maka menjadikan mereka lebih mudah dalam bergerak di bawah tanah sekalipun setelah dibubarkan pemerintah dengan menunggangi ormas keislaman di luar mereka, seperti REMAS Muhammadiyah Sidoarjo. Untuk menjadikan mereka jaringan gerakan dalam memperkuat argumen dan aksi Khilafah Islamiyah mereka, yakni melalui cara "mengajak menghasut" lewat jaringan pertemanan. Hal ini dikuatkan dengan peneliti mengingat ketika Mbak Bibi memberikan salinan link melalui whatsapp terkait kajian online youtube Media Muslimah Center (MMC) saat itu membahas tentang pandangan mereka terkait sistem demokrasi: https://youtu.be/J650R6XUf8o, tidak lupa ia menyarankan untuk membagikan kajian tersebut pada kerabat dan teman terdekat.[50]

Sehingga, dalam menjelaskan terkait bagaimana cara menyusup eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo adalah melalui pemanfaatan kekuatan organisasi. McAdam dalam teori proses politiknya menjelaskan bahwa organisasi sebagai unsur penting bagi terbentuknya gerakan baru.[51] Komunitas label "Ribaatul Ukhuwah" yang dibentuk oleh aktor eks-HTI Sidoarjo bertujuan untuk

[50] Bibi (aktivis eks-HTI Sidoarjo), *Observasi*, Sidoarjo 7 Juli 2019.
[51] Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan struktur kesempatan berupa nilai tambah solidaritas dari jemaah Masjid Al-Firdaus Sidoarjo, menjadi pemimpin yang diakui di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo, dan membentuk jaringan komunikasi dakwah dengan cara rutin membagikan link kajian online dengan topik pengajian yang selalu kental dengan tema Islam politik dan Islam ideologis.[52] Singkatnya eks-HTI menggunakan komunitas dakwah sebagai wadah untuk menyusup ke Masjid Al-Firdaus Sidoarjo.

Kemudian, dalam praktek dakwahnya Mbak Bibi juga sering secara spontan menanggapi dengan cara langsung mencarikan dasar Hadis saat melihat setiap teman-temannya melakukan hal yang dia anggap bid'ah. Hal ini didasarkan atas ketidaksengajaan peneliti membawa kebiasaan gemar berjabat tangan setelah berdoa saat sholat jamaah namun belum meninggalkan posisi sajadah.

2. Tema kajian eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo

Dalam hal penyampaian suatu ajaran Islam, maka diperlukan sumber otoritatif yang terpercaya dan *musnad*-nya benar-benar sampai pada Rasulullah. Karena tidak banyak sejumlah kelompok gerakan Islam yang mengatasnamakan agama dalam berbagai kepentingan tertentu mereka. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, bahwa setiap tindakan kolektif memungkinkan bagi terbentuknya perubahan. Perubahan yang dimaksud salah satunya adalah perubahan ideologi.[53]

---

[52] MMC, "Sistem Demokrasi Politik Kambing Hitam dan Adu Domba", https://youtu.be/J650R6XUf8o, Diakses 7 Juli 2019.
[53] Dady Hidayat, "Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi", *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 17, No. 2, Juli 2012, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, terdapat tema kajian yang melompat dari tema bawaan kajian Muhammadiyah yang sebelumnya lebih pada penekanan pentingnya ilmu dalam beragama,[54] kemudian melompat pada arah pembahasan terkait penekanan pentingnya penerapan Islam ideologis dan penerapan syariah komprehensif terhadap segala aspek kehidupan khususnya pada ranah politik dalam mempersatukan umat Islam.

Dalam konteks ini, peneliti menyampaikan hasil penelitian terkait perbedaan tema kajian di Masjid Al-Firdaus setelah sempat terinjeksi oleh ide gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo. Di mana dalam hal ini, peneliti mengetahui bibi atau tante peneliti sempat mengikuti kajian online yang juga diberikan oleh Ibu dari Mbak Bibi selaku aktor eks-HTI Sidoarjo melalui alamat *link* kajian zoom terhadap jamaah lain di Masjid Al-Firdaus yang juga berprofesi sebagai pendidik. Kajian tersebut bertemakan manajemen pendidikan Islam, yang mereka jelaskan berdasarkan perspektif ciri khas lama mereka yakni anti-moderasi, bahkan anti-Barat, keberanian peneliti dalam mengungkapkan rasa yang berbeda ketika menerima dan menelaah konten online tersebut yang disampaikan oleh seorang ustazah yang berasal dari lingkup Mbak Bibi selaku aktivis gerakan eks-HTI Sidoarjo tersebut. Sedangkan, selama konten kajian offline yang disampaikan oleh sejumlah ustaz Al-Firdaus setempat, tidaklah terdapat masalah dalam hal penerimaannya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam ranah umum, paham ajaran Muhammadiyah tidak anti-moderasi, bahkan tidak anti-integrasi

[54] IBTimes.id, "Muhammadiyah dan Sains", https://mobile.twitter.com/ibtimesid/status/1413048799497359362, diakses 3 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang pendidikan, justru merekalah sebagai perintis penggunaan sains dalam mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diberkahi Allah.[55]

Kemudian, melanjutkan pembahasan tema manajemen pendidikan Islam tersebut, ketika dalam kajian online yang diberikan oleh Mbak Bibi selaku aktivis eks-HTI Sidoarjo yang bergerak di Masjid Al-Firdaus dan sebagai ketua REMAS periode awal saat itu. Ketika sedang mengatur kegiatan kajian umum mingguan rutin tersebut, ia memilih menayangkan ustazah eks-HTI pada kajian online yang ditayangkan melalui kajian zoom kepada masing-masing individu jamaah pilihannya di Masjid Al-Firdaus tersebut, dalam ceramah ustazah tersebut tersampaikan pada jemaah Al-Firdaus dengan nada tegas dan seruan tolakan yang sangat keras terhadap masuknya cabang ilmu asing yang ingin mempengaruhi perspektif pemikiran Islam.

Di mana sebuah kebetulan besar terjadi, dalam hal tersebut salah satu konten online ceramah yang disampaikan oleh ustaz eks-HTI tersebut terkait larangan keras bagi belajar ilmu-ilmu produk pengembangan Barat, secara tegas ia menolak filsafat sebagai pendekatan Ilmiah dalam memberikan perspektif terhadap isu-isu masalah keislaman. Karena bagi mereka, segala sesuatu yang muncul bukan dari Islam adalah tidak halal untuk diikuti secara pemahaman apalagi ditelaah untuk diamalkan. Dalam hal ini, maka karakteristik yang ingin ditekankan oleh eks-HTI Sidoarjo adalah, menolak sedemikian rupa jenis integrasi keilmuan. Karena bagi mereka, hal tersebut hanya sebagai produk tipu daya baru dari Barat dalam upaya memecah belah pengetahuan terhadap pemahaman

[55] Mu'arif, "Muhammadiyah bukan Wahabi", https://ibtimes.id/muhammadiyah-bukan-wahhabi-empat-fakta-sejarah/, diakses 25 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

integritas umat Islam terutama ditujukan pada ranah politik.[56] Secara terkonteks dijelaskan, bahwa semakin kuat pengetahuan tersebut terikat dengan unsur pemahaman di luar Islam, maka pemahaman yang dihasilkan dari pengetahuan tersebut akan dibuat semakin jauh dari Islam itu sendiri. Terutama, dalam bidang politik.

Di samping, sebuah integrasi keilmuan dengan mempertimbangkan aspek normatif atau teologis dan konstitusional setempat akan memicu terhadap kesadaran dan perilaku seseorang pada moderasi beragama. Hal itulah yang mereka khawatirkan, mengingat lawan dari Islam politik adalah moderasi beragama.

Melalui informasi dari Mbak Bibi seorang aktivis eks-HTI Sidoarjo yang masih bergerak, juga selaku mantan ketua REMAS Masjid Al-Firdaus periode pertama tersebut menuturkan, bahwa dalam masa pandemi seperti halnya saat ini tersebut, para aktor gerakan mereka bergerak melalui label-label baru, salah satu yang ditemukan adalah MMC (Media Muslimah Center) sebagai bagian dari media dakwah mereka dalam dunia maya, aktor gerakan eks-HTI tetap aktif dalam menginjeksi sejumlah paham Islam ideologis mereka tersebut. Selain MMC terdapat label komunitas baru lainnya yang disampaikan oleh Mbak Bibi selaku aktivis eks-HTI Sidoarjo yang masih aktif bergerak,

Sebenarnya selain ia, ada juga yang selingkup dengannya yang mungkin peneliti kenal. Ia menyebutkan nama Mbak Indri juga masih aktif dalam mengisi berbagai kajian online salah satunya melalui komunitas MMA (Motivator

[56] Rif'ah Kholidah, "Islam Moderat Tak Beradil", https://youtu.be/ckJHnpVYYYw, diakses 25 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslimah Al-Fath). Kemudian, yang perlu digarisbawahi adalah, di sejumlah anak cabang komunitasnya tidak hanya membahas tentang politik saja, terkait muslimah, sosial, dan pendidikan juga dibahas di sana".[57]

Maka, peneliti akan memberikan penjelasan terkait tema kajian online serupa yang pernah diberikan pada beberapa jamaah Masjid Al-Firdaus oleh Mbak Bibi selaku aktivis eks-HTI Sidoarjo yang masih aktif bergerak ketika masih menjadi ketua komunitas Ribaatul Ukhuwah di Masjid Al-Firdaus saat itu dengan mengadopsi secara menyeluruh dan mengamini pandangan tokoh pemuka mereka, yakni Ustazah Rif'ah Kholidah di media maya youtube tersebut.[58] Tema yang disuguhkan dalam kajian online tersebut adalah berjudul "Islam Moderat Tidak Beradil?" Dalam konten kajian tersebut yang dibahas secara detail, yakni:

Dalam membuka pembicaraan, ia menjelaskan bahwa alasan mengapa pentingnya menjaga ideologi umat Islam adalah, karena menurutnya Barat mengetahui bahwa kuatnya Islam terletak pada ranah ideologi. Oleh sebab itu, dalam konteksnya dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 143, dalam kondisi seperti itu, ayat tersebut menurutnya menyerukan tentang kita selaku umat muslim haruslah membuka mata dalam hal menerima prinsip ideologi dasar untuk hidup. Sebagaimana Allah berfirman:

عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونَ النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَٰلِكَ
يَنْقَلِبُ مِمَّنْ الرَّسُولَ يَتَّبِعُ مَنْ عْلَمَلِذَ إِلَّا عَلَيْهَا كُنْتَ الَّتِي الْقِبْلَةَ جَعَلْنَا وَمَا ۗ شَهِيدًا
لِيُضِيعَ اللَّهُ كَانَ وَمَا ۗ اللَّهُ هَدَى الَّذِينَ عَلَى إِلَّا لَكَبِيرَةً كَانَتْ وَإِنْ ۚ عَقِبَيْهِ عَلَىٰ
رَحِيمٌ لَرَءُوفٌ بِالنَّاسِ اللَّهَ إِنَّ ۚ إِيمَانَكُمْ

[57] Bibi (aktivis eks-HTI Sidoarjo), *Observasi*, Sidoarjo 7 Juli 2019.
[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> **“**Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”[59]

Selanjutnya, dasar tersebut menyerukan untuk bersikap jujur atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, dengan kata lain wajib mengingatkan yang salah dan berani membela yang benar.

Selanjutnya, pada poin pembahasan awal adalah membahas tentang pernyataan apakah Islam moderat berasal dari produk keislaman. Dalam menjawabnya tegas mereka bahwa, mengartikan Islam moderat adalah bersumber dari sekulerisme yang bersumber dari sejarah ketika gerakan para filsuf ingin menghilangkan agama dari kungkungan otoritas kewenangan gereja.[60]

Dalam poin pembahasan berikutnya, adalah membahas tentang pertanyaan apakah kata “Islam *washatiyah*” dalam surah Al-Baqarah: 143, tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut mengandung makna yang mengarah pada Islam moderat?

Sebagaimana, akan peneliti cantumkan pendapat para ulama yang mereka kutip dan mereka ambil dalam sejumlah kitab tafsir dan kitab ulama *mu'tabar*, untuk mengkritik ungkapan “ *umatan wasaton*” diartikan sebagai Islam moderat dalam video youtube yang disampaikan oleh Ustazah Rif’ah Kholidah tersebut tentang tafsir kata dalam surah Al-Baqarah: 143 tersebut, adalah:[61]

a. Menurut Imam Athobari.

---

[59] Al-Qur’an, 2:143.
[60] Ibid.
[61] Rif’ah Kholidah, “Islam Moderat Tak Beradil”, https://youtu.be/ckJHnpVYYYw, diakses 25 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara singkatnya Imam Athobari mengungkapkan bahwa kata "*al-wastu*" dalam ungkapan bahasa Arab diartikan sebagai "*al-khiyar*" atau pilihan terbaik. Sehingga menurutnya disingkat kata tersebut diartikan sebagai umat yang terbaik.

b. *Menurut Syekh Ata' bin Kholil*

Sependapat dengan Imam Athobari, secara singkatnya ia menambahkan dalam mengartikan kata "*al-wastu*" atau "*umatan wasaton*" ia mengatakan bahwa umat pilihan adalah mereka yang adil, kemudian ia menambahkan ungkapannya tersebut, bahwa umat Islamlah yang akan menjadi saksi yang adil atas umat yang lain.

c. *Menurut Imam Asobuni*

Sependapat dengan Imam Athobari dan Syekh Ata'bin Kholil, secara singkatnya ia menyimpulkan dalam kitab *soffatutaffasir* dalam mengartikan kata "*al-wastu*" dan "*umatan wasaton*" adalah dalam ungkapnya sebagaimana telah kami berikan petunjuk pada kalian tentang Islam, dan kian pula telah kami jadikan kalian pula wahai kaum muslimin sebagai "*umatan adlan khiyaron*" atau singkatnya kata tersebut diartikan sebagai umat yang adil dan pilihan.

Sehingga dalam poin kedua ini dapat disimpulkan, bahwa mereka dalam menjawab, mereka memilih tidak. Karena baginya konsep Islam moderat tidak ada dalam surah Al-Qur'an, hadis para nabi bahkan dalam kitab tafsir dan kitab ulama yang *mu'tabar*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, menurutnya tujuan dari Islam moderat adalah sistem penghapus Ideologi Islam politik dan menggantinya dengan pemetaan menurut pandangan Ideologi *range coorporation* atau akrab dengan sebutan teori gerakkan falsafah politik pemecah belah. Dalam hal tersebut menurut mereka, bahwa tujuan dari pemetaan kelompok-kelompok Islam tersebut, tegas menurutnya tujuan dari pemetaan tersebut adalah *pertama*, memunculkan kelompok Islam yang menerima dan mengikuti gagasan Barat (Islam moderat). Sedangkan *Kedua*, dalam sisi lain bahwa kondisi tersebut juga berusaha menekan kelompok Islam tertentu (Islam radikal). Secara terang-terangan, bahwa ia menuturkan bahwa Islam moderat harus secara wajib ditolak dengan keras dan tegas, karena ia menganggap produk pemikiran Barat sudah pasti arahnya pada sekulerisme yang akan memecah belah umat Islam.[62]

Selanjutnya, hal yang disampaikan oleh Ustazah Rif'ah Kholidah tersebut diperkuat dan ditambahkan oleh rekan aktivis eks-HTI-nya yang bernama ustazah Iffah Ainur Rohmah, yakni:[63]

Pertama, bahwa Islam ideologis sebagai *the truly* Islam atau Islam tanpa campur tangan ideologi lain yang membawa keraguan bagi Islam itu sendiri.

Kedua, kata "Moderat" menurut Robert Spencer adalah menolak pemberlakuan hukum Islam, menolak UU bersumber dari Syariat, menolak hukuman mati bagi yang murtad, menolak mengatakan agama Islam yang paling benar, dan mengakui nikah beda agama.

---

[62] Ibid.
[63] Iffah, "Moderat=Wasathiyah, Anda Pasti Keliru!" https://youtu.be/TDu-cDdj3ic, diakses 18 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kesimpulannya mereka berdua sepakat menolak Islam moderat karena sebagai prinsip berislam yang salah, oleh sebab tidak ada dalam teks Al-Qur'an, As-sunah, bahkan sejumlah kitab para ulama yang *mu'tabar*. Serta, mereka sepakat menganggap semua produk pemikiran Barat sudah pasti arahnya pada sekulerisme yang akan memecah belah umat Islam dan memperburuk kondisi Islam terutama bidang politik dalam mempersatukan kekuatan Islam.

C. Dampak Gerakan Sosial eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah bagaimana gerakan sosial eks-HTI timbul khususnya di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Kemudian, bagaimana penyelesaian dampak negatif bagi munculnya gerakan sosial eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo.

Dalam menjawab pertanyaan yang terlontarkan terkait bagaimana munculnya ide gerakan sosial eks-HTI terutama dalam lingkup Masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Singkat cerita, berdasarkan hasil pengamatan Mbak Sakinah selaku teman REMAS peneliti, dan selaku Istri ketua REMAS Masjid Al-Firdaus Sidoarjo periode kedua. Ia mengatakan bahwa,

Intinya sebelum suaminya jadi ketua REMAS Al-Firdaus, Mbak Bibi dipilih jadi ketua REMAS karena kesepakatan bapak-bapak takmir. Ya jelas, karena Pak Zainal Bapaknya Mbak Bibi adalah ketua takmir saat itu. Oleh sebab itu Mbak Bibi ini masih kuliah, entah bagaimana dan kapan ia memutuskan untuk ikut HTI. Saat awal ia menjalankan tugasnya sebagai ketua REMAS periode pertama berjalan semuanya masih normal saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, lebih lanjut, ketika suami Mbak Sakinah masuk di lingkup Al-Firdaus sekitar beberapa bulan, saat itu dimulailah perselisihan terjadi. Harapannya adalah saling berbagi pikiran. Namun, sangat disayangkan sikap Mbak Bibi sebagai ketua saat itu, ia terlalu menekan kondisi dakwahnya anak-anak yang dikatakan masih awal. Di samping, ia juga sebelumnya sudah berjanji pada suami Mbak Sakinah untuk tidak menyebarkan lagi ide-ide gerakannya yang terdahulu, ketika suami Mbak Sakinah awal bergabung di Al-Firdaus Mbak Bibi tetap menyabarkan dan semakin membuat keributan dengan memicu perdebatan dengan suami Mbak Sakinah. Akhirnya suami Mbak Sakinah *to the point* mengode di grup tim REMAS Al-Firdaus dengan ungkapan, "jangan paksa kami seperti HTI juga." Alasan mengapa Mbak Bibi harus berjanji pada suami Mbak Sakinah adalah karena mereka pernah saling mengetahui bersama-sama dalam lingkup HTI, jadi saat itu, Suami Mbak Sakinahlah yang mengetahui siapa sebenarnya dan bagaimana Mbak Bibi dalam mengelola Masjid Al-Firdaus Sidoarjo tersebut.

Namun yang digaris bawahi, suami Mbak Sakinah hanya simpatisan dan ketika suaminya di lingkup Al-Firdaus, ia hanya menjunjung dan mengikuti paham Muhammadiyah secara total. [64]

Kemudian, hal itu senada dikuatkan peneliti, terkait Mbak Bibi adalah aktivis eks-HTI Sidoarjo yang masih bergerak, secara fakta yang dialami oleh peneliti, bahwa dahulu peneliti sering diajak menyebarkan sejumlah buletin yang berisi tentang konten Islam *Kaffah*, dan juga tentang kajian anak muda yang

[64] Sakinah (Eks-Simpatisan eks-HTI), *Observasi*, Sidoarjo 7 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang seputar pendidikan, seruan dakwah dan masih banyak lagi. Sasarannya tidak lain adalah di masjid-masjid besar Muhammadiyah yang letaknya di perkotaan dan perumahan sekitar, tidak jarang juga peneliti memberikan buletin tersebut pada teman REMAS Al-Firdaus baru lainnya yang sekampus namun beda fakultas untuk menyebarkan kembali kepada teman-teman fakultasnya.

Pada akhirnya, rasa kebingungan dari semua jemaah termasuk takmir dan anggota REMAS yang kritis dan pengaruh pada citra kepercayaan Masjid Al-Firdaus oleh masyarakat setempat, saat itu semakin dipertaruhkan tersebut, sebagai dampak negatif dari gerakan tersebut dikarenakan konten kajiannya dinilai oleh sejumlah jemaah yang kritis mengamati hal tersebut, bahwa kajiannya tersebut berbau unsur fundamentalis. Karena membenarkan hal tersebut, seorang anggota REMAS (Suami Mbak Sakinah) yang mendapatkan kepercayaan dari lingkup Al-Firdaus untuk menjadi kandidat ketua REMAS (periode kedua), juga dari sejumlah pengurus takmir tersebut. Senada dengan hal tersebut, peneliti sampai didatangi oleh salah satu jemaah juga sebagai tetangga peneliti bernama Bu Lucha seorang guru SD Negeri yang mengeluh dan bertanya terkait perihal tersebut, sebagaimana yang diungkapkan jemaah tersebut bertanya pada peneliti adalah,

Mengapa di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo tema kajiannya tidak seperti semula, di samping itu lebih banyak pemahaman kajiannya diadopsi total dari ustazah di luar Aisiyah wilayah ini dan juga banyak jemaah pendatang baru yang memakai cadar, ia mengungkapkan semua keanehan tersebut terjadi semenjak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ramainya aktivitas REMAS Al-Firdaus itu, Bu Laucha menginginkan jawaban, mengingat saat ini juga ramai-ramainya berita kelompok fundamentalis yang dibubarkan pemerintah. Karena kekhawatirannya mengarah pada eks-HTI memanfaatkan lingkup Masjid Al-Firdaus untuk hal-hal yang tidak diinginkan jemaah.[65]

Sehingga, jawaban terkait jalan keluar bagi masalah tersebut adalah bersamaan ketika peneliti sampaikan keluhan tersebut pada kandidat ketua REMAS periode kedua tersebut. Setelah ketua REMAS periode kedua tersebut sudah dilantik, maka ia mendapat desakan dari sejumlah keluh kesah warga yang lain dan jamaah, agar segera menyelesaikan perdebatan dalam perebutan kedudukan REMAS di Masjid Al-Firdaus tersebut. Sehingga, ketua REMAS periode kedua tersebut mendiskusikan terkait masalah tersebut dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Maka didapatkan hasil akhir keputusan, bahwa pimpinan cabang Sidoarjo tersebut mengungkapkan, masjid hanya boleh digunakan untuk aktivitas gerakan yang hanya dipimpin oleh seorang anggota pengurus Muhammadiyah dengan konten kajian yang tidak lepas dari paham ajaran Muhammadiyah. Jadi, setelah itu Mbak Bibi memilih keluar dari lingkup keorganisasian Masjid Al-Firdaus tersebut, meskipun Mbak Bibi dan teman-teman eks-HTI Sidoarjonya tersebut tetap tidak jarang mengikuti kajian yang diadakan oleh REMAS Muhammadiyah Masjid Al-Firdaus Sidoarjo tersebut.

[65] Laucha (jemaah Masjid Al-Firdaus dari Desa Punggul), *Observasi*, 14 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN ANALISIS

A. Arah Gerakan Sosial eks-HTI Sidoarjo Perspektif Doug McAdam

Organisasi REMAS Masjid Al-Firdaus sebagai struktur kesempatan dakwah bagi gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo. Hal tersebut dikuatkan oleh McAdam dari pernyataan Zald, bahwa religi sebagai institusi yang memberikan kesempatan yang lebih luas untuk suatu gerakan sosial.[66] Maka, dalam hal ini akan dibahas terkait arah gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo dalam menggambarkan kondisi politik yang seperti apakah yang mendorong mereka untuk menyusup ke Masjid Al-Firdaus Sidoarjo.

1. Gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo sebagai fenomena politik

McAdam dalam teori struktur kesempatan politik, menjelaskan gerakan sosial dipandang sebagai upaya rasional oleh kelompok untuk mendapatkan pengaruh yang cukup dalam memajukan kepentingan politik mereka. Hal tersebut melalui keadaan, saat seseorang berusaha mengakses sebuah kekuasaan politik untuk keperluan mereka bahkan kelompok mereka pribadi. Studi tentang gerakan sosial fokus membahas tentang sejumlah aktivitas partai dan sejumlah kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat penentu keputusan politik, beserta peran dan latar belakang para politisi. Semua gerakan sosial ditujukan untuk melawan penindasan kekuatan sosial dan politik. Namun, bentuk upaya

[66] Rahmat Nur Hakim, "Gerakan Islam Politik Fundamentalis: Kasus HTI di Surabaya", *Review Politik*, 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasional tersebut dilakukan dengan kerangka non-konstitusional atau tidak memasuki sistem politik formal misalnya parlemen, namun mereka melakukan upayanya dengan bentuk partisipasi politik non-konvensional misalnya demonstrasi.[67] Sehingga, McAdam memandang gerakan sosial sebagai suatu fenomena politik.

Fokus dari teori proses politik lebih dominan terletak pada koneksi politik jika dibandingkan kepada sumber daya materialnya. Suatu gerakan sosial dipandang sebagai suatu fenomena politik, namun bukan hanya dipandang sebagai fenomena psikologis seseorang.[68] Dalam hal ini, menurut McAdam sejalan dengan ungkapan Amstrong dan Bestern pada awalnya kemunculan gerakan sosial didasarkan atas pendekatan politik.[69] Namun dalam memahami konteks ini, kata politik yang dibahas peneliti diartikan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Sehingga, politik dalam konteks ini secara wujud penerapannya diartikan sebagai bentuk upaya tertentu untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Dalam kaitannya dengan gerakan sosial eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo, bahwa mereka sebagai komunitas yang gencar dalam menyuarakan ide Islam politik dalam setiap kesempatan dakwah mereka. Oleh karena memahami konteks politik dalam hal ini, sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Sedangkan, Islam politik diartikan eks-HTI sebagai yang merawat kepentingan-kepentingan umat dengan Islam. Sehingga, hal tersebut senada dengan pemaknaan konteks Islam politik

[67] Ibid, 210.
[68] Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, 195.
[69] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan praktiknya bagi mereka bahwa, politisasi Islam sebagai upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat melalui kegiatan merawat kepentingan-kepentingan umat dengan Islam.

Kemudian, ditambah menurut McAdam melalui yang disampaikan Porta dan Diani, bahwa kemungkinan gerakan sosial dapat lahir secara tidak langsung dikarenakan bersinggungan dengan kepentingan negara. Dalam hal ini jelas bahwa aksi gerakan sosial sebagai reaksi kritik kelompok tersebut pada negara. Pada sisi lain, kemunculan gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo timbul karena konsep politik sebagai penggambaran konflik yang terjadi karena persinggungan berupa HTI mengkritik bahkan menentang sistem politik demokrasi yang mereka anggap kufur karena penerapannya jauh dari nilai-nilai Islam dan keadilan, serta mereka akan berusaha menggantinya dengan sistem Islam politik dalam merawat sejumlah kepentingan umat dengan Islam melalui pendirian negara Khilafah Islamiyyah. Salah satu hal pendorong lain yang juga terlihat jelas adalah, mereka masih merasa kecewa terhadap keputusan pemerintah yang secara sepihak membubarkan mereka. Sehingga, tidak heran jika mereka semakin gencar dalam menyusup dan mengupayakan gerakan sosial khususnya di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo secara terselubung.

Kemudian menurut Ainur Rofiq dari yang disampaikan oleh Rokhmat S.Labib sebagai aktivis HTI saat itu, menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara penganut ideologi sekulerisme yang mengakui eksistensi agama, namun pengamalan agama dibatasi hanya pada ranah personal-individual. Sedangkan, masalah politik, pemerintahan, hukum pidana-perdata, hingga pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disterilkan dari agama. Sehingga, kemunculan gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo mengarah pada implikasi ajaran HT sebagai gerakan politik yang memproduksi konstitusi untuk diterapkan.[70] Sehingga, hal tersebut sejalan dengan tema-tema kajian yang mereka sampaikan dengan ciri khas tetap menggelorakan Islam ideologi di belakang ideologi Pancasila yang sudah mengakar kuat.

Secara tampak mereka tidak begitu memperlihatkan serangan kasat mata terhadap ideologi Pancasila. Namun, dalam hal ini mereka membelenggu Pancasila secara esensial terkait umat Islam tidak diperbolehkan memiliki pandangan pendapat yang berbeda di kalangan Muslim terutama terkait bentuk sistem pemerintahan Islam.[71] Sehingga, pernyataan tersebut sebagai bentuk upaya eks-HTI Sidoarjo dalam menyisipkan ideologi Islam politik melalui sebuah proses koneksi politik yang mereka bangun dalam lingkup gerakan sosial.

Secara garis besar poin ini menekankan bahwa, sebuah gerakan sosial tidak dapat begitu saja dilepaskan dari pengaruh politik gerakan itu sendiri. Seperti halnya gerakan sosial eks-HTI. Gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo dalam poin ini, mengarah pada pendefinisian sebuah proses politik ke arah capaian ingin mengubah suatu sistem. Secara sederhananya, kemunculan gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo berupa politisasi Islam yang menekan sistem demokrasi untuk mengupayakan tegaknya Khilafah Islamiyyah melalui jalur dakwah yang terbuka lebar pada ORMAS Islam mapan di Indonesia khususnya Muhammadiyah di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo.

---

[70] Ainur Rofiq Al-Amin, *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*, 158.
[71] Ibid,159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor pendukung gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo

Lebih lanjut terkait operasional dari teori struktur kesempatan politik dalam menjelaskan bagaimana cara eks-HTI agar memperoleh kekuasaan dan kedudukan di masjid Al-Firdaus adalah dengan mengupayakan keseimbangan antara koneksi politik dan struktur sosial sebagai tuntutan dari sebuah standar capaian. Dalam teori ini terdapat empat faktor penting pendorong keberhasilan suatu gerakan, yakni: *kekuatan organisasi, pembebasan kognitif, peluang politik,* dan *sumber koneksi politik gerakan sosial.* [72]

Untuk lebih memperjelas pemahaman, maka peneliti akan memaparkan satu persatu dari poin tersebut di antaranya adalah:

a. Kekuatan organisasi

McAdam dalam teori struktur kesempatan politiknya berpendapat bahwa organisasi berperan penting untuk membentuk gerakan baru. Di mana dalam hal ini organisasi membangun sebuah solidaritas *insentif* atau nilai tambah solidaritas, jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. Sehingga menurut peneliti ketiga hal tersebut sebagai pembentuk potensial bagi terwujudnya sebuah gerakan baru. Jika dikaitkan dengan konteks gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo, maka sama halnya dengan apa yang dilakukan eks-HTI Sidoarjo saat ini bahwa mereka hanya melakukan pembaharuan gerakan, namun tidak akan melakukan pembaharuan pada aspek arah gerakan dan ideologinya. Sehingga, menurut peneliti itulah sebabnya eks-HTI banyak membentuk anak cabang organisasi baru guna untuk membentuk sejumlah gerakan baru. Dengan kata

[72] Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, melalui gerakan baru tersebut, mereka mencari berbagai cara dalam pembaharuan gerakan untuk mempertahankan bahkan memperkuat cita-cita lama mereka dengan mengusahakan pertambahan sejumlah anggota baru dalam mewujudkan Khilafah Islamiyah versi mereka.

Sehingga dalam poin ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya letak kekuatan organisasi adalah sebagai pembentuk gerakan baru, dengan demikian dapat diartikan juga bahwa organisasi sebagai pembentuk kekuatan baru dikarenakan terbentuknya dari sebuah gerakan baru tersebut.

b. *Pembebasan kognitif*

Pembebasan kognitif didefinisikan sebagai persepsi pendorong terhadap kesempatan untuk berhasil dalam masyarakat. Dalam hal ini, mereka memanfaatkan kekuatan rasa percaya diri seseorang untuk mendorong rasa keinginannya agar semakin gigih dalam mencoba melakukan gerakan. Singkatnya, poin ini menjelaskan terkait cara seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar semakin ingin melakukan sebuah gerakan sosial.

Dalam poin ini, singkat penjelasan bahwa pembentukan karakter positif setiap anggotanya sangat penting dalam menyukseskan sebuah pembentukan motivasi mendirikan kelompok. Sehingga, langkah sebelumnya ketika suatu gerakan belum bisa dimulai, maka harus terlebih dahulu terdapat kelompok dimana para partisipannya berkeinginan dan berkeyakinan akan mendapatkan sesuatu dari suatu tindakan bersama. Sama halnya dengan aktor eks-HTI Sidoarjo dalam motivasi partisipan dan simpatisan mereka dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendoktrin bahwa seberat-beratnya mendirikan khilafah berarti sebaik-baiknya menunaikan kewajiban bersama yang dibebankan Allah kepada umat muslim.

c. *Peluang-peluang politik*

Kesempatan-kesempatan politik didefinisikan sebagai *channel* yang menyediakan adanya kesempatan bagi suatu kelompok untuk menduduki suatu lingkungan politik yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin mampu suatu kelompok untuk bersatu di dalam arena politik, maka hal itu menimbulkan peluang yang besar juga untuk kelompok tersebut dapat berhasil dalam melakukan perubahan terhadap suatu sistem politik.[73]

Kesempatan-kesempatan politik sebagai aspek yang lebih utama jika dibandingkan dengan aspek kekuatan organisasi dan aspek pembebasan kognitif. Karena, pada aspek kesempatan-kesempatan politik menjelaskan, bahwa suatu organisasi gerakan diharapkan mendapat dan memanfaatkan kekuasaan politik dalam kesempatan-kesempatan politik tersebut untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan hasil signifikan.

Sistem sosial sebagai ranah penentu bagi layak atau tidaknya suatu gerakan kolektif untuk dapat bertahan, maka gerakan sosial diharuskan berhasil dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. McAdam dalam hal ini menjelaskan, dimana sebuah gerakan eksis terdapat empat dimensi dari kesempatan politik yang berelasi langsung dengan sistem

[73] Ibid, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Singkatnya, karena sistem sosial sebagai elemen penting yang berelasi langsung terhadap munculnya sebuah kesempatan politik, yakni:[74]

1) Relatif terbuka atau tertutupnya suatu kelembagaan sistem politik;
2) Stabil atau tidak stabilnya dari berbagai relasi antar kelompok yang berkuasa;
3) Ada atau tidaknya persekutuan antara sejumlah kekuatan elit dalam masyarakat; dan
4) Kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan tindakan menekan/represif.

Terkait cara pembacaan faktor-faktor tersebut bahwa, masing-masing dari faktor-faktor tersebut memiliki hubungan langsung dalam menentukan kadar kesempatan politik yang ada pada suatu gerakan sosial. Berdasarkan keempat dimensi di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kesempatan bagi terjadinya gerakan sosial adalah karena disebabkan oleh keterbukaan sistem politik. Sedangkan, meski disebabkan karena ketertutupan sistem politik namun hal tersebut justru menjadi pemicu bagi terjadinya sebuah gerakan sosial.

Dimensi stabilitas aliansi-aliansi elit dapat menjadi kesempatan bagi munculnya gerakan sosial, sedangkan instabilitas aliansi-aliansi elit akan menjadi penghambat bagi munculnya gerakan sosial. Dimensi adanya aliansi dengan elit juga menjadi kesempatan bagi munculnya gerakan sosial, sedangkan tidak adanya aliansi dengan elit akan menjadikan penghambat bagi

[74] Ibid, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munculnya gerakan sosial. Dimensi kapasitas negara dalam melakukan tekanan juga berpengaruh terhadap ukuran terjadinya gerakan sosial. Semakin besar kapasitas negara dalam menekan, semakin besar juga gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

Pada aspek kesempatan-kesempatan politik menjelaskan, bahwa suatu organisasi gerakan diharapkan mendapat dan memanfaatkan kekuasaan politik dalam kesempatan-kesempatan politik tersebut untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan hasil signifikan.[75] Sehingga dalam mencapai keberhasilan suatu gerakan yang digalahkan oleh eks-HTI Sidoarjo haruslah mereka berada dalam situasi dan kondisi tempat di mana faktor-faktor di atas tersebut mendukung. Salah satunya, mereka telah menargetkan masjid Al-Firdauslah sebagai tempat di mana faktor-faktor di atas mendukung.

Sehingga, dalam hal ini secara terkonteks dijelaskan bahwa dari beberapa dimensi kesempatan politik yang berelasi langsung dengan sistem sosial atau dengan kata lain, karena sistem sosial sebagai elemen penting yang berelasi langsung terhadap munculnya sebuah kesempatan politik yang mengupayakan arah gerakan sosial eks-HTI berupa politisasi Islam dengan cara menyusup di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Relasi secara langsung antara sistem sosial terhadap kemunculan kesempatan-kesempatan politiklah yang mendorong kemunculan mereka dikarenakan oleh adanya keterbukaan struktur kesempatan dakwah di ORMAS mapan negara khususnya Muhammadiyah di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Kemudian, kondisi lainnya disebabkan karena negara

[75] Ibid, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin menekan eksistensi eks-HTI Sidoarjolah yang menjadikan mereka semakin aktif bergerak menyusup pada keterbukaan ORMAS Islam mapan Sidoarjo dengan cara membentuk sejumlah anak cabang komunitas baru guna meminimalkan efek buruk tekanan negara terhadap eksistensi mereka melalui kekuatan yang berasal dari organisasi mereka dengan cara membentuk sejumlah gerakan baru.

Kemudian untuk menjelaskan kesempatan politik menurut McAdam yang memunculkan suatu gerakan, Soenyono menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Oman Sukmana, mengungkapkan bahwa untuk mengetahui sejumlah kesempatan politik sebagai pemicu bagi munculnya gerakan sosial adalah dijelaskan melalui dua pendekatan umum, yakni:1) *proximate opportunity structure;* 2) *state centered opportunity structure*.[76]

Pertama, *proximate opportunity* structure atau struktur kesempatan terdekat, pendekatan ini menjelaskan bahwa kesempatan politik bagi munculnya suatu gerakan sosial disebabkan karena suatu struktur kesempatan terdekat.

Kedua, *state centered opportunity structure*, pendekatan ini menjelaskan bahwa, struktur kesempatan-kesempatan politik disebabkan karena perihal tentang negara dan semua aspek yang ada di dalamnya sebagai sumber terjadinya kesempatan-kesempatan yang dapat memunculkan aksi kolektif. Secara khusus, pendekatan ini dibagi kembali menjadi dua jenis, yakni:[77]

---

[76] Sydney Tarrow, dalam McAdam, McCarthy, dan Zald, *Comparative Prespective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*, 41-44. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*.
[77] Ibid, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga, secara terkonteks kesempatan-kesempatan politik pendorong bagi kemunculan gerakan sosial eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo secara umum terdiri dari dua sebab yakni, *pertama* karena struktur kesempatan terdekat disebabkan karena kegagalan pemerintah dalam mengurus ranah kepentingan-kepentingan sosial masyarakat, sehingga terjadi sejumlah problem sosial misalnya kemiskinan dan sejumlah kritik untuk pemerintah karena rasa kekecewaan mereka terhadap sistem politik yang ada. *Kedua*, alasan eks-HTI Sidoarjo tetap kokoh dalam menggelorakan Islam politik melalui politisasi Islam dikarenakan dekat dengan perihal negara yang identik dengan politik yang berorientasi pada kekuasaan baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dimana bagi mereka hal tersebut sebagai upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat melalui kegiatan merawat kepentingan-kepentingan umat dengan Islam sebagai tujuan pendirian khilafah Islamiyyah itu sendiri.

3. Sumber koneksi politik gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo

Dalam sub bab ini sebagai penjelas hal apakah sebagai penghubung yang memudahkan eks-HTI Sidoarjo dalam mengupayakan sebuah gerakan sosial. Seperti yang dijelaskan peneliti sebelumnya, bahwa sebuah koneksi politik sangat berdampak pada struktur sosial, begitu juga sebaliknya bahwa sebuah struktur sosial akan memberikan pengaruh pada koneksi politik. Secara lebih khusus, Tornquist mengidentifikasikan tiga isu esensial pada studi politik gerakan sosial, yakni: di mana bidang politik pilihan aktor, terkait apa isu dan kepentingan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didengungkan dan dipolitisir, dan bagaimana aktor tersebut memobilisasi masyarakatnya ke dalam suatu gerakan politik.[78]

Kemudian sumber kekuatan politik gerakan sosial juga dapat dibuktikan dengan *pertama*, kemampuan gerakan sosial memobilisasi individu/kelompok dikatakan sebagai salah satu sumber kekuatan politik lain. *Kedua*, struktur mobilisasi sebagai konseptualisasi jaringan sosial dan institusi sebagai struktur sosial bagi mobilisasi kolektif serta sebagai penjelas bentuk organisasi dalam suatu gerakan.[79]

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terkait arah gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo tetap mengarah pada politisasi Islam melalui keterbukaan struktur dakwah pada ORMAS Islam mapan Sidoarjo khususnya REMAS Muhammadiyah di Masjid Al-Firdaus. Sehingga, dalam hal ini membuktikan bahwa gerakan sosial tidak dapat dipisahkan dari politik gerakan itu sendiri. Sejalan dengan hal ini, tiga strategi penegakan khilafah yang dijelaskan oleh Ainur Rofiq dalam bukunya "Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir" sebagai penjelas pada poin ini. Dimana, menurut peneliti, bahasan tersebut memiliki relasi sebagai penjelas terkait hal apakah sebagai penghubung yang memudahkan eks-HTI Sidoarjo dalam mengupayakan sebuah gerakan sosial. Hal tersebut dikuatkan karena kiat strategi tersebut sebagai penghubung secara politis antara aktor gerakan dan subjek sasarannya. Adapun kiat tiga strategi dakwah tersebut, *pertama*, tahapan merekrut anggota dengan membekali pendidikan dan sudut pandang kebudayaan dari partai

[78] Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, 207.
[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HT; *kedua*, tahap interaksi dengan masyarakat; *ketiga*, tahap pengambilalihan sebagian ranah pemerintahan melalui dukungan umat.[80]

Kemudian, eks-HTI Sidoarjo juga memuat ukuwah Islamiyyah sebagai paham yang wajib ada bagi umat Islam, dalam hal ini mereka menyerukan bahwa sesama muslim adalah saudara. Sehingga, jika seperti itu mereka manfaatkan hal tersebut untuk semakin menguatkan relasi jaringan gerakan didasarkan pada arah politisasi Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika sebagian orang merasa tertarik dengan iming-iming mereka atas nama kepentingan Islam, secara praktiknya mereka melakukan itu karena ingin menyasarkan target agar mereka juga memperoleh kekuatan koneksi politik dari keterhubungan secara psikologis dengan khalayak luas yang sesama muslim agar melindungi bahkan mendukung kepentingan mereka.

Sehingga, pada Arah gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo, dua dimensi dalam konsep teori struktur kesempatan politik yang dominan, adalah dimensi relativitas keterbukaan dan ketertutupan sistem politik, serta kemampuan represi negara. Dalam hal ini tampak jelas bahwa, pada kondisi semakin negara merepresi eksistensi eks-HTI Sidoarjo, maka dengan leluasa eks-HTI Sidoarjo bergerak memanfaatkan ketertutupan sistem politik dengan cara menggunakan komunitas dakwah baru sebagai wadah gerakan untuk menyusup ke Masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Oleh sebab itu, arah gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo memanfaatkan sumber daya yang ada di Masjid Al-Firdaus sebagai salah satu kekuatan untuk mengurangi dampak tekanan negara terhadap eksistensi eks-HTI Sidoarjo.

---

[80] Ainur Rofiq Al-Amin, *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga secara umum tujuan eks-HTI Sidoarjo untuk saat ini adalah membuka berbagai arah baru untuk sejumlah gerakan mereka dalam mengupayakan koneksi politik dari berbagai capaian komunitas dakwah bentukan mereka untuk bersama-sama mewujudkan tujuan mereka dengan berdirinya khilafah Islamiyyah versi eks-HTI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara menyusup eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo

Gerakan sosial eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo, bahwa mereka sebagai komunitas yang gencar dalam menyuarakan ide Islam politik dalam setiap kesempatan dakwah mereka. Konteks politik dalam hal wujud penerapannya dalam hal ini diartikan sebagai bentuk upaya tertentu untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sedangkan, Islam politik diartikan eks-HTI sebagai yang merawat kepentingan-kepentingan umat dengan Islam. Sehingga, hal tersebut senada dengan pemaknaan konteks Islam politik berdasarkan praktiknya bagi mereka bahwa, politisasi Islam sebagai upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat melalui kegiatan merawat kepentingan-kepentingan umat dengan Islam.

Kemudian, ditambah menurut McAdam melalui yang disampaikan Porta dan Diani, bahwa kemungkinan gerakan sosial dapat lahir secara tidak langsung dikarenakan bersinggungan dengan kepentingan negara. Dalam hal ini jelas bahwa aksi gerakan sosial sebagai reaksi kritik kelompok tersebut pada negara. Pada sisi lain, kemunculan gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo timbul karena konsep politik sebagai penggambaran konflik yang terjadi karena persinggungan berupa HTI mengkritik bahkan menentang sistem politik demokrasi yang mereka anggap kufur karena penerapannya jauh dari nilai-nilai Islam dan keadilan, serta mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berusaha menggantinya dengan sistem Islam politik dalam merawat sejumlah kepentingan umat dengan Islam melalui pendirian negara Khilafah Islamiyyah. Salah satu hal pendorong lain yang juga terlihat jelas adalah, mereka masih merasa kecewa terhadap keputusan pemerintah yang secara sepihak membubarkan mereka. Sehingga, tidak heran jika mereka semakin gencar dalam menyusup dan mengupayakan gerakan sosial khususnya di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo secara terselubung.

2. Arah gerakan sosial eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo

Sehingga, dalam hal ini secara terkonteks dijelaskan bahwa, sistem sosial sebagai elemen penting yang berelasi langsung terhadap munculnya sebuah kesempatan politik yang mengupayakan arah gerakan sosial eks-HTI berupa politisasi Islam dengan cara menyusup di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Relasi secara langsung antara sistem sosial terhadap kemunculan kesempatan-kesempatan politiklah yang mendorong kemunculan mereka dikarenakan oleh adanya keterbukaan struktur kesempatan dakwah di ORMAS mapan negara khususnya Muhammadiyah di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Kemudian, kondisi lainnya disebabkan karena negara semakin menekan eksistensi eks-HTI Sidoarjolah yang menjadikan mereka semakin aktif bergerak menyusup pada keterbukaan ORMAS Islam mapan Sidoarjo dengan cara membentuk sejumlah anak cabang komunitas baru guna meminimalkan efek buruk tekanan negara terhadap eksistensi mereka melalui kekuatan yang berasal dari organisasi mereka dengan cara membentuk sejumlah gerakan baru. Dengan kata lain, melalui gerakan baru tersebut, mereka mencari berbagai cara dalam pembaharuan gerakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mempertahankan bahkan memperkuat cita-cita lama mereka dengan mengusahakan pertambahan sejumlah anggota baru dalam mewujudkan Khilafah Islamiyah versi mereka.

Kemudian, kesempatan-kesempatan politik pendorong bagi kemunculan gerakan sosial eks-HTI di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo secara umum terdiri dari dua sebab yakni *pertama*, karena struktur kesempatan terdekat disebabkan karena kegagalan pemerintah dalam mengurus ranah kepentingan-kepentingan sosial masyarakat, sehingga terjadi sejumlah problem sosial misalnya kemiskinan dan sejumlah kritik untuk pemerintah karena rasa kekecewaan mereka terhadap sistem politik yang ada. *Kedua*, alasan eks-HTI Sidoarjo tetap kokoh dalam menggelorakan Islam politik melalui politisasi Islam dikarenakan dekat dengan perihal negara yang identik dengan politik yang berorientasi pada kekuasaan baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dimana bagi mereka hal tersebut sebagai upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat melalui kegiatan merawat kepentingan-kepentingan umat dengan Islam sebagai tujuan pendirian khilafah Islamiyyah itu sendiri.

Kemudian sebagai penjelas hal apakah sebagai penghubung yang memudahkan eks-HTI Sidoarjo dalam mengupayakan sebuah gerakan sosial. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terkait arah gerakan sosial eks-HTI Sidoarjo tetap mengarah pada politisasi Islam melalui keterbukaan struktur dakwah pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ORMAS Islam mapan Sidoarjo khususnya REMAS Muhammadiyah di Masjid Al-Firdaus. Sehingga, dalam hal ini membuktikan bahwa gerakan sosial tidak dapat dipisahkan dari politik gerakan itu sendiri. Sejalan dengan hal ini, tiga strategi penegakan khilafah yang dijelaskan oleh Ainur Rofiq dalam bukunya "Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir" sebagai penjelas pada poin ini. Dimana, menurut peneliti, bahasan tersebut memiliki relasi sebagai penjelas terkait hal apakah sebagai penghubung yang memudahkan eks-HTI Sidoarjo dalam mengupayakan sebuah gerakan sosial. Hal tersebut dikuatkan karena kiat strategi tersebut sebagai penghubung secara politis antara aktor gerakan dan subjek sasarannya. Adapun kiat tiga strategi dakwah tersebut, *pertama,* tahapan merekrut anggota dengan membekali pendidikan dan sudut pandang kebudayaan dari partai HT; *kedua,* tahap interaksi dengan masyarakat; *ketiga,* tahap pengambilalihan sebagian ranah pemerintahan melalui dukungan umat.

Kemudian, eks-HTI Sidoarjo juga memuat *ukuwah Islamiyyah* sebagai paham yang wajib ada bagi umat Islam, dalam hal ini mereka menyerukan bahwa sesama muslim adalah saudara. Sehingga, jika seperti itu mereka manfaatkan hal tersebut untuk semakin menguatkan relasi jaringan gerakan didasarkan pada arah politisasi Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika sebagian orang merasa tertarik dengan iming-iming mereka atas nama kepentingan Islam, secara praktiknya mereka melakukan itu karena ingin menyasarkan target agar mereka juga memperoleh kekuatan koneksi politik dari keterhubungan secara psikologis dengan khalayak luas yang sesama muslim agar melindungi bahkan mendukung kepentingan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Sebagaimana saran yang penulis berikan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Saran teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik untuk ke depannya, juga banyak digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut oleh sejumlah mahasiswa. Karena atas kesadaran penulis akan kekurangan dalam penelitian ini.

2. Saran praktis

Saran penulis adalah masyarakat luas harus tetap membuka nalar yang logis dalam tetap teliti ketika menerima informasi yang berasal dari lingkup organisasi kemasyarakatan yang berkenaan dengan sejumlah ide gerakan yang mengatasnamakan agama sebagai ideologi dalam mengupayakan tujuan politik. Karena pada dasarnya ajaran Islam sebagai agama yang rahmat, maka secara esensial dan eksistensialnya tidak mungkin mengarahkan kita pada suatu tindakan yang ekslusif bahkan diktator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

AberCrombie, Hill, dan Turner. 2010. *Kamus-Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

_____.2012. "HTI dan Konstruksi Khilafah", *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara

_____. "Kritik Pemikiran Khalifah Hizbut Tahrir yang Autokratik", *Teosofi*, Jakarta, 12 Juli 2008

Al-Amin, Ainur Rofiq. 2019. *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*. Jombang: Wahid Foundation

_____. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta Foundation

Bibi (Aktivis eks-HTI yang masih Bergerak). *Observasi*. Sidoarjo 7 Juli 2019

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

Erianto, Kristian. 2017. "HTI Ajukan Kasasi terkait Pencabutan Badan Hukum oleh Pemerintah". https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia. Diakses 18 Juli 2020

Hanifuddin, Muhammad, dkk. 2020. "Merawat Tradisi untuk Moderasi", *Kutbah Jumat Kontemporer*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta

Hartono, Djoko. 2009. *Pengembangan Ilmu Agama Islam Dalam Perspektif Filsafat Ilmu.* Surabaya: MQA Surabaya

Hidayat, Daddy. 2012. "Gerakan Dakwah Salafi Era Reformasi," *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol.17, No.2. Depok: LabSosio FISIP-UI

Hizb al-Tahrir. *Manhaj Hizb al-Tahrir*. Dalam buku *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*

IBTimes.id. "Muhammadiyah dan Sains". https://mobile.twitter.com/ibtimesid/status/1413048799497359362. Diakses 3 November 2020

Iffah. "Moderat=Wasathiyah, Anda Pasti Keliru!". https://youtu.be/TDu-cDdj3ic. Diakses 18 Juli 2020

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* Jakarta: Erlangga

Kaelan. 2010. Metode *Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kodim 0816 Sidoarjo. "Silaturahmi Pengurus HTI di Koramil Sidoarjo". http://kodim0816-sidoarjo.com/detailpost/silaturahmi-pengurus-hti-di-koramil-081601-sidoarjo. Diakses 15 September 2020

Laucha (jemaah Masjid Al-Firdaus dari Desa Punggul). *Observasi*. 14 September 2019

Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall. Dalam buku Konsep Dan Teori Gerakan Sosial

Mardiasih, Kalis. 2018."Bagaimana Radikalisme Diturunkan?", *Berislam Seperti Kanak-Kanak*. Tangerang Selatan: Yayasan Islam Cinta Indonesia

McAdam dan Tarrow. 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*

MMC. "Sistem Demokrasi Politik Kambing Hitam dan Adu Domba". https://youtu.be/J650R6XUf8o. Diakses 7 Juli 2019

Mu'arif. "Muhammadiyah bukan Wahabi". https://ibtimes.id/muhammadiyah-bukan-wahhabi-empat-fakta-sejarah/. Diakses 25 Agustus 2021

Notosusanto, Nugroho. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan IIIda

Nur Hakim, Rahmat. "Gerakan Islam Politik Fundamentalis: Kasus HTI di Surabaya", *Review Politik*. Diakses 2 Desember 2020

Porta, Della dan Diani. 2002. *Social Movements an Introduction*. Malden: Blackwell Publishing. Dalam buku Konsep Dan Teori Gerakan Sosial

Rif'ah Kholidah. "Islam Moderat Tak Beradil". https://youtu.be/ckJHnpVYYYw. diakses 25 Juni 2020

Sakinah (Eks-Simpatisan eks-HTI). *Observasi*. Sidoarjo 7 Agustus 2019

Shuwayki, Muhammad. 1998. "Taj Al-Furud al-Khilafah," *Al-Wa'i.* No. 130. Dalam buku *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*

Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing

Sydney, Tarrow. Mengutip dari McAdam, McCarthy dan Zald. 2004. *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunity Structure, Mobilizing Structure, Cultural Framing*. Cambridge: Cambridge University Press. Dalam buku Konsep Dan Teori Gerakan Sosial

Usman, Husaini. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahlstrom dan Peterson. 2006. *Between the State and the Market Expanding the Concept of "Political Opportunity Structure"*. Oxford: ActaSociologica. Dalam buku *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*

Wikipedia. "Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021". www.bps.go.id. Diakses 17 Januari 2022

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusanto, Ismail Muhammad. 2006. "Kebangkitan Islam Menentang Moderasi dan Globalisasi," *Al-Wa'i.* No. 67. Dalam buku *Mematahkan Argumen Hizbut Tahrir*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id